

# MIGRASI DAN PLURALITAS MASYARAKAT DI KOTA SABANG

Penyunting:

Irini Dewi Wanti  
Kodrat Adami

Direktorat  
Kebudayaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH



304 B3

IRI

.m

**MIGRASI DAN PLURALITAS MASYARAKAT  
DI KOTA SABANG**

**EDISI REVISI**

**Penyunting:**

Irini Dewi Wanti

Kodrat Adami

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH  
2016**

Migrasi dan Pluralitas Masyarakat di Kota Sabang  
viii + 90 hlm 14,8 x 21 cm  
**ISBN: 978-602-9457-61-2**

Judul  
Migrasi dan Pluralitas Masyarakat di Kota Sabang  
Edisi Revisi

Penyunting  
Irina Dewi Wanti  
Kodrat Adami

Copyrights ©2016 BPNB Aceh

Desain Sampul  
Angga

---

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
All rights reserved

---

Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh  
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh  
Telp/Faks : +62651 – 23226  
[http: kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh)  
email: [bpnbaceh@kemdikbud.go.id](mailto:bpnbaceh@kemdikbud.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

### **KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH**

Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakatnya, baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan kepercayaannya. Ada yang menganggap bahwa kemajemukan masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial, tetapi jika berjalan secara selaras, serasi, dan harmonis akan tercipta integrasi sosial dan itu dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Hal yang demikian dapat dijumpai pada masyarakat Sabang sebagai salah satu daerah yang intensitas kemajemukannya sangat tinggi, tetapi masyarakatnya dapat hidup secara rukun dan damai.

Pada umumnya masyarakat Sabang adalah pendatang, yang terdiri atas beberapa etnis di Indonesia yang sudah dimulai sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda di Aceh. Kemajemukan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di Sabang. Masyarakat Sabang dalam kehidupan sehari-hari sangat terbuka dan toleran terhadap budaya dan etnis lain. Pengalaman masyarakat di Sabang dalam merawat kemajemukan dapat menjadi inspirasi dan pengaruh positif bagi daerah lain dalam menjaga kemajemukan masyarakat di Indonesia.

Sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, yaitu penyebarluasan informasi hasil kajian kesejarahan dan kenilaitradisional yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan media, di antaranya pencetakan dalam bentuk buku. Untuk itu, penerbitan buku tentang migrasi dan pluralitas ini merupakan upaya agar tersedianya bacaan tentang sejarah dan budaya. Hal ini mengingat semakin terdesaknya posisi bahan bacaan yang mengandung nilai edukatif dan pesan moral.

Buku ini merupakan hasil penelitian tahun 2001 dan telah diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 2002. Kami melihat buku ini penuh dengan nilai-nilai pendidikan berbudaya dan sarat dengan pesan-pesan moral, seperti toleransi, keterbukaan, dan kerukunan. Oleh karena

itu, buku ini dirasa perlu dipublikasikan kembali. Setelah dilakukan berbagai perbaikan, pengurangan, dan penambahan, buku ini diterbitkan dalam edisi kedua. Hal itu, dimaksudkan dalam rangka proses transformasi nilai-nilai dan pembentukan karakter bangsa. Sejarah dan budaya masa lalu, meskipun sosoknya telah usang, justru sering memberikan pencerahan. Mempelajari sejarah dan budaya diharapkan dapat mempertemukan manusia terhadap berbagai kearifan.

Buku ini bukan hanya penting bagi masyarakat Aceh, tetapi penting, diperlukan, dan menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Mengenal sejarah dan budaya masyarakat Aceh merupakan bagian dalam usaha mengenal sejarah dan budaya Indonesia. Saya yakin, apabila setiap kita dapat pula menyusun dan menerbitkan buku-buku semacam ini maka semakin banyak unsur-unsur sejarah dan budaya Indonesia yang kini belum diketahui, akan dapat diungkapkan dan dikembangkan ke depan. Dengan demikian, kita lebih kaya akan bahan-bahan yang diperlukan untuk mempelajari dan mengenal identitas bangsa kita sendiri dan historis kulturilnya, suatu hal yang mutlak diperlukan bagi pembangunan bangsa

Banyak pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat dipublikasikan. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kami menyadari pula bahwa isi dan penyajian buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa.

Banda Aceh, November 2016



Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP.  
NIP 197105231996012001

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kerangka Penelitian.....	2
D. Kerangka Pemikiran .....	2
E. Metodologi Penelitian.....	8
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA SABANG</b> .....	<b>11</b>
A. Latar Belakang Daerah .....	11
B. Latar Belakang Kehidupan Sosial Budaya .....	15
1. Jumlah dan Profil Kependudukan .....	15
2. Pendidikan.....	17
3. Mata Pencaharian Penduduk dan ketenagakerjaan .....	22
4. Agama dan Kepercayaan.....	26

BAB III. MIGRASI DAN PLURALITAS MASYARAKAT DI KOTA SABANG.....	28
A. Proses Terjadinya Migrasi dan Pluralitas Masyarakat di Kota Sabang .....	28
1. Masa Kolonial .....	28
2. Sabang pada Masa Revolusi Kemerdekaan .....	43
3. Sabang pada Masa Pelabuhan Bebas .....	48
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi dan Pluralitas Masyarakat .....	56
1. Faktor Politik atau Kebijakan Pemerintah .....	58
2. Faktor Ekonomi.....	60
3. Faktor Sosial.....	65
4. Faktor Demografi.....	65
C. Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Pluralitas Masyarakat .....	67
D. Interaksi Antarmasyarakat di Kota Sabang .....	69
1. Penduduk Asli dengan Pendatang .....	73
2. Antarpenduduk Pendatang .....	80
BAB IV. PENUTUP .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
DAFTAR INFORMAN .....	89

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tata Guna Lahan di Kota Sabang .....	14
Tabel 2. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan 2012-2015 .....	16
Tabel 3. Persentase Penduduk Wanita Menurut Usia Kawin Pertama .....	17
Tabel 4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2015 .....	18
Tabel 5. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2015 .....	19
Tabel 6. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2013-2015 ...	20
Tabel 7. Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2015 .....	23
Tabel 8. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Lapangan Kerja Tahun 2013-2015 .....	24
Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015 .....	25
Tabel 10. Komposisi Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kota Sabang .....	26
Tabel 11. Kunjungan Kapal Dagang di Pelabuhan Sabang pada Tahun 1936-1937 .....	33

Tabel 12. Kunjungan Kapal Perang di Pelabuhan Sabang pada Tahun 1936-1937 .....	34
Tabel 13. Jumlah Penduduk Suku Bangsa Aceh di Sabang pada Tahun 1935.....	35
Tabel 14. Jumlah Warga Asing dan Pribumi Lainnya di Sabang Tahun 1935.....	37
Tabel 15. Perbandingan Jumlah Penduduk di Sabang berdasarkan Kewarganegaraan.....	43

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Sabang merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang dapat dikatakan cukup istimewa. Di daerah inilah terdapat tugu nol kilometer, yang menandai dimulainya perhitungan jarak di wilayah Republik Indonesia. Selain itu, daerah ini pernah menjadi perhatian setiap orang. Berdasarkan penetapan Presiden No. 10 tahun 1963, Sabang pernah dinyatakan sebagai pelabuhan bebas, selama beberapa tahun, yang kemudian dicabut lagi oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1998 Presiden B.J. Habibie melalui Keppres No. 171 tahun 1998 tanggal 23 September 1998 menetapkan Sabang sebagai Kawasan Pengembangan Terpadu (Kapet). Pada tahun 2000 status Sabang berubah menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang dicanangkan oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan dikeluarkannya Inpres No. 2 Tahun 2000.

Sejak zaman dahulu, Sabang telah menjadi tempat singgah para pendatang. Letaknya yang cukup strategis, di jalur Selat Malaka, memungkinkan pendatang sampai ke daerah ini. Pada zaman kolonial Belanda sampai dengan tahun 1985 Sabang merupakan kawasan pelabuhan bebas dan tempat kapal-kapal dari berbagai negara berhenti untuk mengisi bahan bakar. Pada saat itulah terjadi interaksi sosial antara penduduk Sabang dengan awak kapal. Selain itu, Sabang menjadi tempat orang untuk mengadu nasib dan mencari kehidupan. Tidak hanya suku bangsa Aceh, suku bangsa lain seperti Jawa, Minang, Batak, dan Tionghoa juga hidup di Sabang. Kondisi ini pada akhirnya membentuk masyarakat Sabang yang plural.

## **B. Masalah**

Dari penjelasan singkat di atas, peneliti mengadakan penelitian tentang masalah migrasi dan pluralitas yang ada di Sabang. Dalam penelitian ini, diajukan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimanakah proses terjadinya migrasi dan pluralitas di Sabang dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Kedua, bagaimanakah persepsi dan sikap, serta interaksi masyarakat dalam kondisi plural yang ada di Sabang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses terjadinya migrasi dan pluralitas di Sabang serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadi migrasi dan pluralitas. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi mereka yang berminat dalam penelitian serupa. Diharapkan pula hasil penelitian ini berguna sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan di bidang pembangunan kebudayaan.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Perhatian terhadap fenomena gerak penduduk telah berlangsung cukup lama. Lebih dari seabad yang lalu Ravenstein (1885) muncul dengan “Hukum-hukum migrasi” yang pada mulanya berlandaskan hasil analisis data statistik Kerajaan Inggris yang diperluas dari beberapa negeri utama di Eropa dan Amerika Utara. Hukum-hukum ini berkenaan dengan migrasi dan jarak, migrasi berlangsung menurut tahap-tahap, *stream* dan *counter stream*, perbedaan desa dan kota dalam kecenderungan bermigrasi, lebih

dominannya perempuan di kalangan migrasi jarak dekat teknologi dan migrasi serta dominannya motivasi ekonomi. Hukum-hukum migrasi Ravenstein sering disebut para ahli yang menelaah gerak penduduk (Rusli, 1995: 143-144).

Sejak zaman Ravenstein telah pula muncul teori-teori dan tipologi gerak penduduk sebagai hasil usaha para ahli yang memberi perhatian terhadap bidang ini. Yang paling populer di antaranya adalah teori dorong tarik (*pull-push theory*) sekalipun teori ini tidak bebas juga dari kritikan. Teori dorong-tarik dipandang terlalu sederhana karena tidak memperhitungkan berbagai faktor pribadi, sosial dan kebudayaan. Menurut teori dorong-tarik, alasan meninggalkan daerah asal dapat dipandang sebagai faktor pendorong, sementara alasan memilih daerah tujuan dipandang sebagai faktor penarik.

Selain itu, ada juga teori kesempatan antara yang cukup populer juga untuk memahami fenomena gerak penduduk. Teori ini menyatakan bahwa jumlah orang pergi ke suatu jarak tertentu berbanding lurus pada jarak tersebut dan berbanding terbalik dengan jumlah kesempatan antara. Kerangka teori yang lebih luas mengenai migrasi dapat dilihat dari karya Lee (1969) yang mengembangkan sejumlah hipotesis berkenaan dengan volume migrasi, *stream* dan *counterstream* serta karakteristik para migran. Lee berpendapat bahwa dalam tindakan migrasi yang jarak dekat dan jarak jauh senantiasa terlibat faktor-faktor yang berhubungan dengan daerah tujuan, pribadi dan rintangan-rintangan antara. Di tiap daerah ada tiga set faktor-faktor itu, yaitu;

1. Faktor-faktor yang bertindak untuk mengikat orang dalam suatu daerah, atau memikat orang terhadap daerah itu yang disebut sebagai faktor minus

2. Faktor-faktor yang cenderung untuk menolak mereka merupakan faktor plus, dan
3. Faktor-faktor yang pada dasarnya indifferen tidak punya pengaruh menolak atau mengikat.

Faktor plus dan minus dapat disejajarkan dengan kekuatan-kekuatan sentripetal (gaya “dorong”) dan kekuatan sentripetal (gaya “tarik”) yang memengaruhi individu atau kelompok penduduk apakah akan tetap tinggal di suatu daerah atau akan meninggalkan daerah bersangkutan. Kekuatan sentripetal mengikat atau menahan individu atau kelompok penduduk untuk tetap tinggal sementara sentripetal terjadi sebaliknya (Rusli, 1995: 145).

Salah satu bentuk/tipologi migrasi adalah merantau. Merantau berasal dari kata rantau. Merantau dengan awalan me- dapat berarti pergi ke rantau dan sering juga disebut melakukan perantauan. Merantau mengandung beberapa elemen utama, yaitu meninggalkan kampung halaman; dengan kemauan sendiri; untuk jangka waktu lama atau tidak dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman, biasanya dengan maksud kembali pulang dan merantau merupakan lembaga sosial yang membudaya (Naim, 1974: 18). Di Indonesia, ada beberapa suku bangsa yang mempunyai budaya merantau, seperti suku bangsa Minang, Jawa, Bugis, Madura, dan Aceh (Pidie).

Masyarakat Aceh mendefinisikan merantau sebagai pergi mencari penghidupan ke daerah lain. Masyarakat di daerah ini mengenal beberapa macam istilah yang mengandung makna merantau, antara lain *jak utimue* (pergi/ merantau ke timur) dan *jak meudagang* (pergi berdagang), belajar di pesantren atau pergi mencari pengetahuan serta merantau pergi mencari pengalaman dan penghasilan. Dari berbagai versi merantau yang ada di

Aceh, Siegel (1969) menggolongkan merantau itu menjadi dua tipe rantau, yaitu merantau ke timur (*jak utimue*) dan merantau ke pesantren.

Bentuk atau tipe yang pertama menurut Siegel sudah muncul sejak lama, jauh sebelum tipe rantau kedua muncul. Prosesnya dimulai dengan berangkatnya orang-orang Aceh ke daerah pesisir pantai barat untuk menanam lada di ladang. Dalam hal ini masyarakat Aceh mengenal rantau barat dan rantau timur yang berarti merantau ke pantai barat dan merantau ke pantai timur. Merantau ke timur merupakan rantau berjarak jauh sehingga kaum laki-laki hanya pulang ke kampung setiap beberapa tahun. Sifat rantau ini hanya sementara sehingga mereka tidak membawa istri dan anak-anaknya ke daerah perantauan. Siegel (Budiarti, 1989: 31) menyebutkan bahwa tipe rantau ini lebih berkaitan dengan tujuan ekonomi.

Tipe rantau kedua, yaitu merantau ke pesantren, muncul karena pengaruh ulama. Ulama menawarkan suatu alternatif bagi laki-laki Aceh untuk merantau dengan jarak dekat agar seorang laki-laki (suami) mempunyai hak terhadap istri dan anak-anaknya karena mereka tidak meninggalkan kampung halaman.

Kehidupan pesantren dapat dipandang sebagai bentuk merantau. Menurut Snouck Hurgronje (1906: 26) kata yang digunakan untuk belajar ke pesantren yaitu *meudagang*, yang sesungguhnya berarti menjadi orang asing yang berpindah dari satu tempat. Seseorang tidak dapat menjadi ulama dengan belajar di daerah kelahirannya, tanpa keluar kampung dan mencari tempat yang tepat untuk menjadi ulama. Orang Aceh mengatakan tidak akan pernah ada seorang laki-laki pun yang menjadi alim tanpa keluar kampung untuk merantau ke pesantren. Karenanya, setiap orang Aceh harus keluar dari daerahnya untuk menjadi orang yang dihargai di daerahnya sendiri (Hurgronje, 1906: 25).

Dalam beberapa tulisannya, Siegel telah menjelaskan gejala merantau di Aceh lebih banyak disebabkan alasan ekonomi daripada sosial budaya. Hal ini dikarenakan pada saat ia melakukan penelitian, keadaan ekonomi pedesaan di Aceh sangat buruk akibat revolusi sosial yang sedang berlangsung di Aceh. Siegel kurang memperhatikan faktor-faktor lain selain faktor ekonomi, padahal ada faktor lain juga yang mendorong orang Aceh melakukan perantauan.

Budiarti (1989: 33-34) menunjukkan bahwa faktor sosial budaya merupakan faktor penting yang harus ikut diperhatikan untuk menganalisis penyebab tradisi merantau di daerah Aceh. Pertama, struktur sosial masyarakat Aceh yang matrilokal, pasangan pengantin harus tinggal di kerabat istrinya sampai anak pertama lahir (sekitar 3-4 tahun). Setelah itu, mereka berpisah rumah karena mertua memberi rumah kepada anak wanitanya. Seorang suami karenanya menjadi tidak mempunyai otonomi, tetapi tergantung pada mertuanya, ia tidak memiliki kekuasaan mantap di rumah istrinya dan tidak pula di rumah ibunya. Istri di Aceh disebut *po rumoh* (yang punya rumah), yakni yang memiliki kekuasaan atas rumah yang mereka tempati.

Kedua, pola pengasuhan anak yang membuat seorang anak tidak betah di rumah. Dalam masyarakat Aceh terdapat suatu kecenderungan bahwa anak laki-laki yang telah berumur kira-kira 5 atau 6 tahun diharuskan meninggalkan rumah untuk pergi ke *meunasah* belajar Al-Qur'an. Setelah selesai mengaji, biasanya langsung ke tempat-tempat yang tidak jauh dari *meunasah* yang disebut *balee*. (B. Alamsyah, 1992: 70). Mereka hanya pulang kalau akan makan atau dipanggil oleh orang tua untuk membantu bekerja. Sesudah anak laki-laki mencapai umur 12 tahun dan sudah dikhitan, sebagai pertanda bahwa mereka telah dewasa, maka tidak ada kesempatan baginya untuk tinggal di rumah. Mereka sudah harus

tidur di *meunasah*. Dari fenomena sosial ini dapat dilihat bahwa kebiasaan untuk tidak tinggal di rumah telah tumbuh semasa seseorang masih kecil, yaitu sejak umur 6 tahun sampai memasuki jenjang kedewasaan. Dari kecil dibiasakan untuk menjauhi rumah sehingga perasaan betah tinggal di rumah menjadi sangat terbatas.

Ketiga, perantauan merupakan sebuah upaya untuk menghindari ketidaksesuaian dalam keluarga yang bersifat meluas. Dalam sistem keluarga luas, suami dan istri tetap merupakan bagian dari keluarga induk. Hubungan mariental mereka sering mengalami kegoncangan karena hubungan lebih ditentukan oleh faktor eksternal berupa interaksi antarkeluarga induk. Laki-laki walaupun terhitung sebagai keluarga di rumah ibunya, tidak mendapat bagian harta warisan. Peranan suami di rumah istrinya tidak begitu penting, baik sebagai suami maupun sebagai ayah. Ia tidak begitu berperan dalam kehidupan ekonomi dan tidak berperan dalam proses membesarkan dan mendidik anak karena ia jarang tinggal di rumah. Dengan demikian, struktur sosial yang seperti dikemukakan di atas inilah yang telah melahirkan pola rantau di Aceh.

Salah satu daerah tujuan migrasi di Aceh adalah Sabang. Sabang dijadikan sebagai daerah tujuan migrasi karena daerah ini memiliki potensi yang menjanjikan dalam memenuhi kehidupan penduduk sehingga sejak dulu daerah ini menjadi daerah tujuan migrasi. Berbagai suku yang ada di Indonesia pernah datang dan menetap di daerah ini, selain suku-suku yang ada di Aceh. Kondisi yang demikian pada akhirnya membentuk masyarakat yang sangat pluralis.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Alasan dipilihnya kota ini sebagai lokasi penelitian secara purposive karena daerah ini merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang tingkat pluralitas dan migrasi masyarakatnya cukup tinggi.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini lebih bersifat sebagai penelitian studi kasus. Menurut Black dan Champion (1976: 93-94), studi kasus merupakan penelitian terhadap kesatuan sosial yang dipilih sebagai bahan kajian terhadap kesatuan yang lebih luas, tetapi hubungan antara kesatuan sosial ini tidak dapat diperkirakan secara pasti. Artinya, hasil penelitian ini belum dapat dijadikan patokan untuk menarik kesimpulan umum.

Sebagai suatu penelitian kasus, kesimpulan yang dihasilkan tentu saja terbatas pada kesatuan sosial yang diteliti. Pada lingkup yang lebih luas, kesimpulan yang dihasilkannya hanya berlaku sebagai proposisi hipotesis. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki arti penting dan berguna seperti yang diuraikan dalam tujuan penelitian ini.

Menurut Marzali (1980), studi kasus bukanlah suatu teknik penelitian kasus, tetapi merupakan suatu pendekatan, suatu cara agar dapat diperoleh suatu sifat yang utuh (*unitary character*) dari objek sosial yang diteliti. Di Indonesia, pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan antropologis. Ciri-ciri umum yang dikenal adalah pemahaman

secara mendalam, holistik, mengabaikan representativitas subjek penelitian terhadap masyarakatnya, tidak menggunakan sampel besar, dan tidak dapat dianalisis dengan angka secara statistik.

### **3. Pendekatan**

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang biasa dilakukan dalam ilmu antropologi dan sejarah. Pendekatan ilmu sejarah membawa konsekuensi pada metode penelitian ini. Karenanya, pada penelitian ini digunakan pula cara *heuristik* (mencari sumber) yang dilakukan di perpustakaan, kritik atau analisis (berupa menilai sumber), interpretasi atau sintesis (menafsirkan keterangan dari sumber-sumber sejarah dan *historiografi* (penulisan sejarah). Pendekatan ilmu antropologi membawa konsekuensi pada cara penetapan responden dan informan, sifat penelitian dan teknik pengumpulan data (lihat pada sub bab E.2, E.4, dan E.5).

### **4. Pemilihan Responden dan Informan**

Sumber data primer adalah mereka yang mengetahui seluk beluk tentang terbentuknya pluralitas dan migrasi di Sabang. Di samping itu, penelitian ini juga memerlukan informan yang mampu memberikan informasi yang berkenaan dengan topik penelitian, seperti *keuchik* (kepala desa) dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap cukup representatif tentang masalah yang diteliti.

## **5. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, baik untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Adapun cara pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berencana untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian, sedang pertanyaannya meliputi pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Selain itu dilakukan juga wawancara tidak berstruktur, tetapi masih mempertimbangan fokus tertentu penelitian ini dan pemakaian wawancara terakhir dimaksudkan untuk melengkapi hasil wawancara berstruktur.

Sesuai dengan teknik di atas, dilakukan juga observasi partisipasi pada saat penelitian dilakukan guna melakukan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diharapkan diperoleh dari dokumen yang telah tersedia dan relevan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen ini diperoleh dari berbagai perpustakaan yang ada di Banda Aceh, seperti perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, serta Perpustakaan dan Arsip Daerah.

## **BAB 2. GAMBARAN UMUM KOTA SABANG**

### **A. Latar Belakang Daerah**

#### **1. Letak dan Kondisi Alam**

Kota Sabang<sup>1</sup> merupakan salah satu di antara 18 Kabupaten dan 5 Kota yang ada di Provinsi Aceh. Kota Sabang beribukota di Sabang. Sabang ini terletak di Pulau Weh, yang merupakan salah satu pulau yang terletak di kawasan paling ujung pulau Sumatera. Secara geografis daerah ini terletak pada koordinat 05° 46' 28" – 05° 54' 28" Lintang Utara (LU) dan 95° 13' 02" – 95° 22' 36' Bujur Timur (BT). Di sinilah terletak tugu nol kilometer, yaitu tugu perhitungan jarak wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Dapat dikatakan daerah Sabang merupakan kawasan yang sangat strategis, karena terletak pada jalur masuk bagian barat dan antara kawasan Asia Pasifik dan Asia Barat Daya. Karenanya, Sabang pernah menjadi tempat pengisian bahan bakar, pengisian air bersih dan pusat jasa pelayanan bagi kapal-kapal yang menggunakan pelayaran internasional. Sabang dapat ditempuh melalui laut dan udara.

---

<sup>1</sup> Kota Sabang terbentuk setelah pemerintah RI mengeluarkan UU No. 10 Tahun 1965 yang meningkatkan status Kawedanan Sabang menjadi Kotapraja (Kotamadya Sabang) dan memisahkan Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo (Tempurung) dari Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Besar menjadi daerah otonom tingkat II.

## Bab II. Gambaran Umum Kota Sabang

Pelabuhan Sabang dengan berbagai peninggalan masa lalunya sering dikunjungi oleh berbagai kapal jalur internasional, baik kapal penumpang atau barang dengan tujuan Lautan Hindia dan Pasifik. Sabang juga dapat ditempuh selama 90 menit dari bandara Kualanamu Medan ke bandara Maimun Saleh yang terletak di Cot Bak U di Sabang (3 kilometer dari Kota Sabang). Sabang juga dapat ditempuh melalui laut dengan menggunakan kapal ferry dari pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh ke pelabuhan Balohan, Sabang dengan jarak tempuh 45 menit dengan kapal cepat dan  $\pm$  90 dengan kapal lambat. Balohan memiliki jarak sekitar 11 km ke kota Sabang.

Suhu rata-rata di Sabang adalah  $26^{\circ}$  C pada saat musim barat yang terjadi pada bulan November hingga Januari dan  $28,4^{\circ}$  C saat musim timur yang terjadi antara Mei hingga Juli. Curah hujan yang tercatat rata-rata 1.745 - 2.232 mm/tahun, dengan angka terendah pada bulan Maret sebesar 18 mm dan angka tertinggi pada bulan September sebesar 276 mm. Curah hujan tersebut membuat Sabang menjadi daerah sejuk bahkan selama musim kemarau. Gunung-gunung yang menjulang tinggi di pulau tersebut mengeluarkan embun di waktu siang dengan cuaca yang cukup nyaman pada malam hari. Sabang menjadi tempat yang ideal untuk kegiatan bisnis dan wisata.

Kegiatan kepariwisataan di Sabang sangat mempesona. Para pengunjung dapat menikmati pesona matahari terbit dan terbenam di Samudera Hindia. Puluhan pantai nan indah dengan terumbu karang yang mempesona, ikan hias dan beraneka ragam tanaman laut terdapat di Sabang. Sabang telah dikenal luas oleh banyak wisatawan dari Eropa Barat, Australia, Amerika, Kanada, Korea, Jepang, dan lain-lain. Peralatan rental untuk kegiatan *diving*, *snorkeling* dan kebutuhan lainnya tersedia di daerah ini.

Untuk kegiatan bisnis, Sabang telah ditetapkan sebagai daerah kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet), yang diresmikan pada tanggal 22 September 1998 dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1999. Kapet Sabang merupakan sebuah badan yang didirikan oleh pemerintah untuk melayani para investor asing dan dalam negeri yang ingin menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Berbagai kemudahan dan bantuan akan diberikan bagi para investor pada Kapet Sabang. Kapet ini memiliki luas 263, 75 km<sup>2</sup>, yang terdiri atas Pulau Weh, Pulau Seulako, Pulau Rondo, Pulau Klah (di Kota Sabang), Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom di Kabupaten Aceh Besar.<sup>2</sup>

Luas seluruh wilayah daerah ini adalah 15.300 Ha atau 153 km<sup>2</sup> dengan rincian penggunaan tanah pada tabel 1 di bawah ini.

---

<sup>2</sup> Pelabuhan Sabang terkenal dengan pelabuhan alamnya, dibangun pada tahun 1881 dan diberi nama “Kolen Station” oleh pemerintah kolonial Belanda. Firma Delange yang dibantu oleh Sabang haven diberikan wewenang untuk menambah berbagai fasilitas pelabuhan pada tahun 1887. Pada tahun 1895, Kolen Station benar-benar beroperasi, pelabuhan ini dibuka sebagai pelabuhan bebas. Operasional pelabuhan bebas dilaksanakan oleh *Mastchaapij Zeehaven en Kolen Station* yang selanjutnya dikenal dengan nama *Sabang Mastchaapij*. Sabang diduduki tentara Jepang pada tahun 1942. Pasukan sekutu kemudian membombardir pelabuhan ini hingga hancur dan akhirnya pelabuhan bebas ini ditutup. Pada tahun 1950, pelabuhan Sabang dijadikan pusat angkatan laut RIS dengan wewenang penuh dari pemerintah. Semua aset *Sabang Mastchaapij* dibeli dengan harga 1 juta gulden Belanda. Sabang dibuka kembali sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1965 melalui Keppres No. 10/1965 dan diperkuat dengan UU No. 4/ 1970. Sayangnya, status pelabuhan bebas kembali dicabut pada tahun 1985 dan dibuka kembali pada tahun 2000.

**Tabel 1**  
**Tata Guna Lahan di Kota Sabang**

No	Uraian	Luas Wilayah	
		Sukajaya	Sukakarya
1.	Sawah	0,00	60,00
2.	Perkampungan	627,00	419,00
3.	Tanah Tegalan/ Kebun	940,00	449,24
4.	Tanah Ladang	25,00	10,00
5.	Padang Pengembalaan	8,00	6,00
6.	Hutan Lindung	2.795,72	2,168,25
7.	Hutan Wisata	0,00	1.413,50
8.	Perkebunan	3.094,28	2.657,00
9.	Rawa	0,00	30,00
10.	Tambak	12,00	25,00
11.	Lain-lain	398,00	262,01
Jumlah		7.900,00	7.500,00

Sumber: BPS Aceh

## **B. Latar Belakang Kehidupan Sosial Budaya**

### **1. Jumlah dan Profil Kependudukan**

Pada waktu penyerahan kedaulatan, jumlah penduduk Sabang relatif sedikit yaitu kurang lebih 6.000 jiwa. Kemudian, berangsur-angsur bertambah sampai pada permulaan tahun 1965 dengan jumlah penduduk kira-kira 13.000 jiwa (menurut catatan kantor wedana Sabang). Jumlah yang pasti baru diketahui sesudah dilakukan sensus pada tahun 1971, yaitu 17.225 jiwa terdiri dari 16.572 jiwa WNI dan 653 WNA. Pada tahun 1990 jumlah penduduk di daerah ini adalah 24, 4 ribu jiwa dan pada tahun 1998 sebesar 22,844 ribu jiwa.

Pertumbuhan penduduk di kota ini disebabkan oleh dua hal, yakni pertumbuhan penduduk secara alami dan pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh adanya migrasi. Selama lima tahun terakhir penduduk Kota Sabang terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk, penduduk Kota Sabang pada tahun 2015 tercatat sebanyak 33.215 jiwa yang terdiri atas 16.819 laki-laki dan 16.396 perempuan.

Dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan di antaranya pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk tidak produktif. Dalam kurun waktu 2012-2015 komposisi penduduk umur 0-14 tahun mengalami penurunan dari 31,39 persen pada tahun 2012 menjadi 30,59 persen pada tahun 2015. Komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) naik dari 64,70 persen tahun 2012 menjadi 65,41 pada tahun 2015. Hal tersebut berdampak pada semakin menurunnya angka beban tanggungan setiap 100 penduduk usia produktif, dari 54,56 pada tahun 2012 berkurang menjadi 53,13 penduduk tidak produktif pada tahun 2015.

**Tabel 2**

**Komposisi Penduduk dan Angka Beban Tanggungan 2012-2015**

Tahun	Kelompok Umur			Beban Tanggungan
	0-14	15-64	>65	
2012	31,39	64,70	3,91	54,56
2013	31,45	64,63	3,92	54,72
2014	30,79	65,16	4,05	53,46
2015	30,59	65,31	4,11	53,13

Sumber: BPS Aceh

Umur perkawinan pertama bagi wanita mempunyai dampak demografis karena berpengaruh terhadap angka fertilitas. Semakin muda seorang wanita menikah semakin panjang masa reproduksinya dan semakin besar kemungkinan mempunyai anak. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2014 dan 2015, tampak bahwa pernikahan di rentang umur 19-24 tahun merupakan yang paling dominan di Kota Sabang. Sedangkan penduduk wanita Kota Sabang yang menikah di umur 16-18 tahun pada tahun 2015 berjumlah 12,39 persen atau berkurang 12,79 persen dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan persentase menikah muda yaitu di bawah 16 tahun turun dari 4,64 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 0,43 persen pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran akan besarnya resiko perkawinan muda sudah sangat meningkat di kalangan penduduk wanita. Dengan demikian, program

pemerintah yang menganjurkan supaya penduduk wanita baru menikah di atas usia 20 tahun sudah berjalan dengan baik.

**Tabel 3**

**Persentase Penduduk Wanita menurut Usia Kawin Pertama**

Usia Kawin Pertama (Tahun)	Tahun	
	2014	2015
≤15	4,63	0,43
16-18	25,18	12,39
19-24	51,91	71,23
25+	18,28	15,95
Total	100,00	100,00

Sumber: BPS Aceh

## 2. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Dengan demikian, program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan ekonomi dan sosial.

Pada tabel 4 tampak penduduk usia 10 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah. Terlihat bahwa sebagian besar (hampir 80 persen) penduduk Kota Sabang tidak bersekolah lagi. Sementara itu, penduduk

yang masih sekolah sebesar 19,67 persen. Persentase penduduk laki-laki yang tidak bersekolah lagi lebih besar dibandingkan perempuan, yaitu 81,32 persen sedangkan perempuan sebesar 78,97 persen. Hanya 0,97 persen penduduk Kota Sabang yang belum atau tidak pernah sekolah yang keseluruhannya adalah penduduk perempuan.

**Tabel 4**

**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas  
Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2015**

Partisipasi sekolah	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Tidak/ belum pernah sekolah	0,00	1,97	0,97
Sekolah	18,68	20,68	19,67
Tidak sekolah lagi	81,32	77,36	79,36
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Aceh

Status pendidikan menggambarkan jenjang pendidikan yang sedang diduduki. Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas status pendidikan menunjukkan bahwa sekitar 30 persen penduduk masih menduduki bangku sekolah dasar (SD), sedangkan penduduk yang sedang menduduki bangku SMP dan SMA jumlahnya masing-masing sebesar 29,75 persen dan 25,60 persen. Sementara itu, penduduk yang masih dalam pendidikan di perguruan tinggi (Diploma dan Universitas) jumlahnya sebesar 14,85 persen.

**Tabel 5**

**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2015**

Status Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Sekolah Dasar	41,67	18,91	29,80
SMP	26,08	33,12	29,75
SMA	23,67	27,32	25,60
Perguruan Tinggi	8,57	20,65	14,85
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Aceh

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh rata-rata penduduk suatu negara mencerminkan taraf intelektualitas suatu bangsa.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) secara spesifik dapat dilihat dari komposisi penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan. Pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMA ke atas masing-masing sebesar 11,64 persen; 24,27 persen; dan 49,12 persen. Sementara itu, penduduk yang menamatkan perguruan tinggi mengalami penurunan selama dua tahun terakhir, yaitu 14,48 persen pada tahun 2013 menjadi 12,34 persen pada tahun 2015 atau turun sekitar 2 persen.

**Tabel 6**

**Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas  
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2013-2015**

No	Tingkat Pendidikan	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Tidak/ Belum Tamat SD	11,66	12,50	11,64
2.	SD Sederajat	18,70	20,75	14,98
3.	SMP Sederajat	20,30	21,37	24,27
4.	SMA Sederajat	34,97	32,10	36,78
5.	Perguruan Tinggi	14,38	13,27	12,34
		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Aceh

Kota Sabang mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan dengan cukup baik. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa hal, antara lain tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan berupa gedung dan sarana fisik lainnya. Adanya keikutsertaan pemerintah dalam memajukan pendidikan, misalnya dengan lancarnya transportasi, adanya antusias masyarakat terhadap pendidikan yang dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan yang ada dalam wilayah kota, naiknya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, serta meningkatnya pendapatan masyarakat hingga dapat menyekolahkan anaknya sampai tingkat perguruan tinggi.

Berkaitan dengan pembangunan fasilitas pendidikan formal, kegiatan belajar-mengajar pada masyarakat Sabang pada saat sekarang

menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data statistik tahun 2015, di Kota Sabang terdapat 15 TK (Taman Kanak-Kanak), 25 SD (Sekolah Dasar), 5 MI (Madrasah Ibtidaiyah), 9 SMP (Sekolah Menengah Pertama), 2 MTs (Madrasah Tsanawiyah), 4 SMA (Sekolah Menengah Atas) dan 1 MA (Madrasah Aliyah).

Selain pendidikan formal, para orangtua yang beragama Islam menyerahkan pendidikan anaknya pada *meunasah-meunasah* untuk dididik dalam bidang ilmu keagamaan. Biasanya, pengajaran dilakukan oleh guru-guru agama/*teungku* pada waktu pagi, sore atau malam hari. Ilmu keagamaan juga diberikan oleh lembaga pendidikan agama (pesantren) yang ada dalam wilayah Kota Sabang. Pesantren ini bersifat tradisional dengan pengajaran bertumpu pada satu mazhab. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Sabang, terdapat 5 pesantren di kota ini tahun 2015 dengan jumlah santri sebanyak 617 orang.

Untuk pendidikan tata kelakuan dan sosialisasi diberikan sejak awal kehidupan seorang anak. Pendidikan ini disebut juga dengan istilah pendidikan seumur hidup yang diberikan dalam bentuk nasehat ataupun cerita dari para orangtua kepada anak-anaknya. Jenis pendidikan sosialisasi ini mencakup bahasan yang luas dan sang anak harus mengalami pendidikan itu, baik bersama dengan orangtuanya ataupun mengalami pendidikan tersebut ketika dia bergaul dengan masyarakat. Masyarakat Sabang yang sekarang ini telah berkembang, baik dari segi ekonomi dan pendidikan, telah menjadikan beberapa nilai tradisional yang telah terpola dalam pendidikan sosialisasi masyarakat Sabang pada zaman dahulu telah mengalami pergeseran dan perubahan. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya pendidikan sosialisasi secara adat, dan sedikit demi sedikit telah digantikan dengan pendidikan sosialisasi cara modern yang belum tentu sesuai dengan situasi sosial dan budaya masyarakat Sabang.

### **3. Mata Pencaharian Penduduk dan Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap ada pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan dalam PJP II adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja.

Pola kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Sabang secara nyata berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja di Kota Sabang adalah 23.109 orang, jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 22.740 orang atau mengalami peningkatan 1,62 persen. Persentase bekerja laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang menganut budaya patriarki mengenai pembagian tugas dalam keluarga dimana kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi tanggung jawab laki-laki, sedangkan perempuan bertugas mengurus rumah tangga. Terbukti dengan besarnya persentase penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga sebanyak 3.781 orang, sementara laki-laki hanya 271 orang.

**Tabel 7****Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2015**

No	Jenis kegiatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Angkatan Kerja	10116	6389	16.505
	Bekerja	9592	5656	15.258
	Pengangguran Terbuka	524	733	1.257
2.	Bukan Angkatan Kerja	1524	5080	6.604
	a. Sekolah	789	1028	1.817
	b. Mengurus RT	110	3781	3.891
	c. Lainnya	625	271	896
Jumlah		11.640	11.469	23.109
Tingkat Partisipasi AK		43,78	27,65	71,42
Tingkat Pengangguran		5,18	11,47	7,62

Sumber: BPS Aceh

Komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2015 mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian meningkat menjadi 14,24 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 13,97 persen pada tahun 2013 dan 12,54 persen pada tahun 2014. Adapun berdasarkan lapangan kerja, penduduk paling banyak bekerja di sektor Jasa

Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan dengan proporsi yang cukup besar, yaitu 3 dari 5 penduduk yang bekerja berada di sektor ini.

**Tabel 8**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Kerja Tahun 2013-2015**

No	Lapangan Pekerjaan	Tahun		
		2013	2014	2015
1.	Pertanian	13,97	12,54	14,24
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,00	3,10
3.	Industri	2,63	5,33	7,52
4.	Listrik	2,37	1,21	0,73
5.	Konstruksi	6,56	6,97	9,95
6.	Perdagangan dan Rumah Makan	22,38	25,12	17,80
7.	Transportasi dan Pergudangan	7,71	4,97	5,65
8.	Keuangan	0,49	1,85	0,89
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	43,64	42,01	40,13

Sumber: BPS Aceh

Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan. Tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Kota Sabang berstatus buruh/karyawan, sedangkan status pekerjaan berusaha dengan buruh tetap persentasenya masih kecil, yaitu di bawah 5 persen.

**Tabel 9**

**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015**

No	Status Pekerjaan	Jumlah
1.	Berusaha sendiri	19,58
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	8,7
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	4,94
4.	Buruh/karyawan/pegawai	56,15
5.	Pekerja bebas	4,7
6.	Pekerja keluarga/ tidak dibayar	6,43

Sumber: BPS Aceh

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang kerja atau mencari pekerjaan yang disebut dengan istilah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Di Kota Sabang secara keseluruhan selama tahun 2013-2015 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 58,56 pada tahun 2013 menjadi 71,42 pada tahun 2015 atau naik sebesar 12,86 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kota Sabang telah aktif secara ekonomis, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Dilihat dari perbedaan jenis kelamin, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan, yaitu 86,91 persen berbanding 55,71 persen. Hal ini tentunya disebabkan laki-laki merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga.

Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya penyerapan tenaga kerja sehingga angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah karena mereka terpaksa menganggur. Angka pengangguran terbuka (APT) di Kota Sabang selama periode 2013-2015

## Bab II. Gambaran Umum Kota Sabang

turun, yaitu dari 12,50 persen pada tahun 2013 menjadi 5,44 pada tahun 2015.

### 4. Agama dan Kepercayaan

Agama merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh pemeluk agama tersebut. Dalam kehidupan seorang manusia, agama penting artinya sebagai landasan dan sistem kontrol manusia dalam berperilaku serta mengerjakan suatu perbuatan. Setiap perbuatan pastilah memiliki konsekuensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ajaran agama yang dianutnya.

Penduduk Kota Sabang mayoritas adalah pemeluk agama Islam dan sebagian kecil saja dari mereka yang merupakan pemeluk agama lain. Selain agama Islam, agama yang juga dianut oleh masyarakat Kota Sabang adalah Katholik, Protestan, Hindu dan Budha seperti tampak pada tabel 10.

**Tabel 10**

#### **Komposisi Pemeluk Agama Menurut Kecamatan di Kota Sabang**

No	Kecamatan	Agama				
		Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha
1.	Sukajaya	20184	14	138	2	10
2.	Sukakarya	20151	58	268	-	398
Jumlah		40.335 (97,85)	72 (0,17)	406 (0,98)	2 (0,04)	408 (0,99)

Sumber: BPS Aceh 2016

Untuk menunjang kegiatan ibadah sehari-hari masyarakat Kota Sabang, pemerintah daerah telah menyediakan sarana beribadah. Sarana tersebut antara lain 21 mesjid, 68 *meunasah*, 1 gereja Katholik, 1 gereja Protestan dan 1 buah kelenteng.

## **BAB 3. MIGRASI DAN PLURALITAS MASYARAKAT DI KOTA SABANG**

### **A. Proses Terjadinya Migrasi dan Pluralitas Masyarakat di Kota Sabang**

#### **1. Masa Kolonial**

##### **a. Posisi Sabang bagi Kepentingan Pemerintah Hindia Belanda**

Terjadinya perang kolonial di Aceh pada tahun 1873 berpengaruh terhadap pentingnya posisi Sabang (Pulau Weh) bagi Pemerintah Hindia Belanda dalam mempertahankan *Atjeh en Onderhoorigheden*. Pulau Weh yang ditumbuhi oleh hutan lebat, memiliki pantai yang bagus, tepat untuk menjadi basis pertahanan militer Belanda dan sebagai daerah blokade dari pantai Aceh. Pulau ini sangat cocok sebagai tempat evakuasi bagi sipil dan militer Belanda yang menderita sakit dan terluka. Letak pulau yang tinggi dari permukaan laut dan memiliki teluk yang dalam dan tanjung yang menonjol jauh sehingga bagus sebagai pelabuhan. Di pantai utara terletak Teluk Balohan yang panjangnya 3.500 meter, dengan pintu masuk selebar 3.000 meter, kemudian secara bertahap mengecil hingga 1.000 meter. Teluk ini dapat dilayari pada segala musim. Kondisi yang demikian membuat pemerintah Belanda memilih Sabang sebagai sebuah pelabuhan yang aman sebagai tempat parkir armada Angkatan Laut Belanda dan tempat perbekalan perang bagi pasukan Belanda (De Vos, 1935: 2).

Perkembangan lalu lintas kapal uap dunia menuntut kemudahan-kemudahan terhadap pelabuhan. Pada tahun 1873, untuk pertama kalinya di

Hindia Belanda dibangun sebuah pelabuhan di Batavia yaitu di Tanjung Priok yang diselesaikan pada tahun 1893. Pada waktu itu juga pekerjaan yang sama berjalan pula di Surabaya, Belawan, Emmahaven (Padang), dan juga termasuk Sabang (Hall, 1988: 556). Letak Sabang yang sangat strategis sebagai tempat persinggahan bagi kapal-kapal yang melalui Selat Malaka dalam perjalanan ke dan dari Asia Timur, serta yang melalui Terusan Suez dan untuk yang datang dan pergi dari Tanjung Harapan. Keadaan alam dan iklimnya menguntungkan bagi navigasi baik siang maupun malam. Selanjutnya, hal tersebut juga menarik minat pihak swasta untuk mengelola pulau tersebut sebagai pelabuhan bebas dan stasiun batu bara (*kolenstation*). Sabang juga harus mampu berkompetisi dengan stasiun batu bara yang telah lama ada seperti Pelabuhan Colombo dan Singapura yang dikuasai Inggris terutama dalam hal duane pengambilan batu bara (Langhout. 1924: 131-132).

#### **b. *Zeehaven en Kolenstation Sabang* (Pelabuhan Laut dan Stasiun Batu Bara Sabang)**

Pulau Weh mulai didatangi dan dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1877 ketika sebuah komisi yang terdiri atas seorang kepala staf, asisten residen dan seorang dokter mengunjungi pulau tersebut untuk mengadakan penelitian. Oleh pemerintah kolonial Belanda di Kutaraja dikibarkan bendera Belanda di Balohan dan diangkat sebagai penjaganya yaitu T. Daud yang diberi gelar “wakil pemerintah Belanda” (De Vos, 1935: 25). Pada tahun 1887 firma *De Lange & Co* yang berkedudukan di Batavia mendirikan *Sabang Haven* yang mendapatkan bantuan dari *Nederlandsch Handel Maatschappij* setelah firma tersebut mendapatkan konsesi dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan *kolenstation* di pelabuhan Sabang. Pada tahun 1892, firma yang dipimpin oleh J.M.H. Van Oosterzee ini mengelola pangkalan dan gudang

penimbunan batu bara, pertama-tama diperuntukkan bagi kapal-kapal pemerintah dan angkatan laut Belanda (Langhout, 1923: 1433). Pada tahun 1893, telah berjalan pemerintahan dalam negeri dan militer Belanda di Sabang. Pembangunan *kolenstation* ini baru selesai pada tahun 1895. Pembukaan pelabuhan bebas Sabang ini pada mulanya hanya melayani keperluan bahan bakar berupa batu bara dan kebutuhan air bagi kapal laut yang singgah di pelabuhan tersebut. Pada masa itu kapal-kapal masih menggunakan sedemikian banyak batu bara sehingga penyimpanannya memerlukan ruang batu bara yang tidak begitu jauh jaraknya dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya sehingga dengan demikian dapat mengurangi jumlah batu bara yang perlu diangkut (De Haal, 1988:504).

Pemerintah Hindia Belanda menghendaki Sabang selain sebagai stasiun penyimpanan batu bara sekaligus juga sebagai pelabuhan transit barang-barang, terutama dari hasil pertanian Deli yang telah menjadi daerah perkebunan tembakau sejak tahun 1863. Pada tahun 1895 dilepaskan pemuatan batu bara pertama yang datang dari tambang batu bara ombilin di Sumatera Barat. Kemudian pelabuhan juga menyediakan bahan bakar minyak yang dikirim dari Plaju (Palembang), serta hasil perkebunan berupa lada, pinang dan kopra dari daerah Aceh sendiri (Koloniaal Tijdschrift, tt: 615). Untuk melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan, pihak perusahaan dan pemerintah Belanda membangun kantor imigrasi, kantor pos dan telegraf, sentral radio, kantor penyitaan, rumah pejabat-pejabat dan pengawas, gudang-gudang, dua perusahaan air ledeng; satu milik pemerintah dan satu milik maskapai, WC dan saluran air yang dialirkan ke laut, jalan-jalan, Sabang Hotel dan tempat tinggal bagi orang-orang Belanda yang bekerja di sana. Pelabuhan bebas untuk perdagangan umum baru dibuka di Sabang pada 4 April 1896 sehingga Sabang mulai dikenal bagi lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Tahun 1899 sejumlah kapal bunker disediakan oleh N.V. *Zeehaven en Kolenstation Sabang*. Perusahaan kemudian melengkapi lagi dengan dok dan bengkel

reparasi bagi kapal-kapal yang berlalu lintas Eropa-Hindia Belanda. Pada tahun ini juga telah ada kabel bawah laut antara Sabang-Ulee Lheue sehingga Sabang dapat berhubungan ke segala penjuru dunia. Setelah datangnya armada Inggris yang basis angkatan lautnya di Singapura, posisi Sabang ini menjadi sangat berarti bagi Belanda (Jongejans, tt: 234), menyaingi Singapura dan Colombo. Sabang selalu mengalami perkembangan setelah dikelola langsung oleh *Nederlandsche Handel Maatschappij* (lebih dikenal dengan Sabang Maskapai). Ditambah lagi dengan adanya lima jalur pelayaran kapal-kapal Belanda di Hindia Belanda yang sebahagian besar melalui Sabang yang tentunya mengakibatkan pelabuhan Sabang semakin ramai, rute tersebut adalah:

1. Rute Barat cepat, dari Batavia melewati Sinabang (untuk pos dan penumpang), Ulee Lheue, Sabang, Sigli, Lhokseumawe, Langsa ke Penang dan kembali ke Batavia,
2. Rute Barat lambat, dari Surabaya melalui Singkil, Pulau Banyak, Sinabang, Tapaktuan, Meulaboh, Calang, Sabang, Ulee Lheue, Belawan-Deli menuju Penang dan Singapura dan dari sana kembali lagi ke Batavia,
3. Rute Timur, dari Batavia melalui Singapura dan Penang melewati Lhokseumawe, Sigli, Ulee Lheue, Sabang, Ulee Lheue, Calang, Meulaboh, Tapaktuan, Sinabang, Pulau Banyak, Singkil, selanjutnya ke Batavia dan Surabaya,
4. Rute pelayaran yang tidak menurut kontrak, dari Penang melalui Belawan ke Langsa, Idi, Lhokseumawe, Sigli, Ulee Lheue, Sabang dan dari sana melewati Sigli, Lhokseumawe, Idi dan Langsa melalui Belawan kembali ke Penang, dan

5. Rute pelayaran tidak menurut kontrak sekali seminggu, dari Penang melalui Belawan ke Langsa dan kembali lagi ke Penang (Kreemer, 1923: 70).

Semakin ramainya orang-orang Eropa yang tinggal di Sabang dan semakin ramainya lalu lintas pelayaran melalui pulau tersebut maka pada tahun 1902 didirikan sebuah pabrik es untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tahun 1909 Sabang Maskapai mengembalikan semua harta miliknya kepada pemerintah Hindia Belanda, tidak dijelaskan sebabnya, tetapi tidak lama Maskapai sebagai *pacht* untuk jangka waktu 50 tahun, yang berarti jangka waktu pelabuhan bebas baru akan berakhir pada tahun 1960 (Ismail, 1980: 101). Pada tahun 1930 Sabang Maskapai mengalami perpecahan dan kemunduran juga sebagai akibat krisis ekonomi. Sejak itu perusahaan terpaksa melakukan penghematan besar-besaran dan sebagai akibatnya banyak dilakukan pemutusan hubungan kerja serta pengurangan upah. Beberapa industri ditutup, seperti pabrik triplek yang banyak menampung tenaga kerja. Kondisi menjelang perang dunia kedua berpengaruh pula terhadap lalu lintas pelayaran di Sabang, seperti digambarkan pada tabel 11 di bawah ini.

**Tabel 11**

**Kunjungan Kapal Dagang di Pelabuhan Sabang  
pada Tahun 1936-1937**

Kapal dari negara	Jumlah		Perbedaan
	1936	1937	
Belanda	166	226	+60
Hindia Belanda	269	224	-45
Inggris	146	112	-34
Jerman	27	45	+18
Norwegia	53	48	-5
Yunani	87	46	-41
Jepang	17	24	+7
Negara Lain	39	46	+7
Jumlah	804	771	-33

Sumber: Jongejans (1939: 87)

Pada tahun 1937, secara keseluruhan jumlah kapal yang masuk ke Sabang berkurang walaupun jumlah kapal Belanda sendiri meningkat. Sebaliknya, kapal perang jumlahnya meningkat dari 7 kapal perang menjadi 18 kapal perang pada tahun yang sama (Jongejans, 1939: 235).

Tabel 12

**Kunjungan Kapal Perang di Pelabuhan Sabang  
pada Tahun 1936-1937**

Kapal dari Negara	Tahun	
	1936	1937
Belanda	3	5
Inggris	-	9
Perancis	1	4
Negara lain	3	-
Jumlah	7	18

Sumber: Jongejans (1939)

Kejayaan Sabang Maskapai berakhir dengan pecahnya Perang Dunia II yang diikuti dengan mendaratnya tentara Jepang di pulau tersebut pada tahun 1942. Dengan demikian, sesungguhnya pelabuhan bebas dan stasiun batu bara Sabang belum pernah ditutup secara resmi, tetapi terpaksa ditutup karena perang. Selama masa pendudukan Jepang ini Sabang mengalami kehancuran fisik yang sangat berat. Setelah Indonesia merdeka stasiun pelabuhan Sabang dianggap sama kedudukannya dengan daerah lain dan semua hak milik Sabang Maskapai dibeli pemerintah RIS pada tahun 1950 dengan harga 1 juta gulden (Ismail, 1988: 101).

**c. Migrasi dan Pluralitas Masyarakat Sabang pada Masa Kolonial**

Berdasarkan Stb. 1902 No. 350, kemudian Stb. 1934 No. 539, pembagian pemerintahan di *onderafdeeling* Sabang dibagi atas 4 mukim

yaitu Sabang, Balohan, Iboih dan Paya (De Vos, 1935: 15), masing-masing *imeum mukim* mendapatkan tunjangan dari pemerintah Hindia Belanda £ 300 pertahun. Di bawah mukim ini disebut *gampong* (kampung) yang dikepalai oleh *keuchik* (Kreemer, 1923: 198). Ibukota *onderafdeeling* Sabang terdiri dari 3 bagian:

1. Perkampungan Dagang, terletak di teluk, tempat berkumpulnya buruh-buruh dalam kamp-kamp N.V. *Zeehaven en Kolenstation Sabang*,
2. Perkampungan tempat tinggal orang-orang Eropa, terletak di perbukitan di atas perkampungan dagang, dan
3. Kampung Blang Glumpang bergabung dengan perkampungan Eropa. Di sini rumah-rumah dibangun sangat baik dan juga terdapat tempat tinggal kepala urusan orang-orang Melayu dan perkampungan Aceh (de Vos, 1935: 14).

**Tabel 13**

**Jumlah Penduduk Suku Bangsa Aceh di Sabang pada Tahun 1935**

Mukim	Jumlah
Sabang	1700
Balohan	500
Paya	800
Iboih	200
Total	3200

Sumber: De Vros, (1935, 7)

Setelah itu datanglah orang-orang Aceh dan orang-orang Nias ke pulau ini selama perang kolonial Belanda di Aceh, terutama yang tidak ambil bagian dalam peperangan. Gelombang berikutnya datang dari Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Utara dan pantai timur yang pindah ke Pulau Weh ini untuk berkebun merica (sehingga sekarang ada kampung yang bernama Kebun Merica). Pada mulanya mereka datang tanpa membawa keluarga, tetapi setelah mereka berhasil barulah keluarganya dibawa. Mereka datang dengan perahu-perahu nelayan dan kapal-kapal dagang, begitu pula dengan buruh-buruh lainnya yang datang untuk bekerja di Sabang Maskapai. Orang-orang Aceh yang datang lebih dulu telah mempunyai pemukiman yang baik, apalagi setelah diperbaikinya sarana-sarana jalan oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Pada tahun 1929 terdapat 1.100 orang-orang Aceh dan 1.400 pribumi lainnya di Sabang. Pada tahun 1935, jumlahnya mencapai 3.200 orang Aceh dan 4.000 pribumi lainnya, dengan jumlah laki-laki yang paling banyak, diikuti oleh perempuan dan anak-anak, baik dari orang-orang Aceh maupun orang-orang dari seberang (daerah lain). Di sini mereka membentuk kumpulan-kumpulan orang-orang Aceh dan kumpulan orang-orang pendatang lainnya. Peninggalan tempat penampungan buruh pelabuhan yang terdiri atas orang Cina, Arab dan sebagian dari daerah lain di Nusantara dinamakan kongsi.

**Tabel 14**

**Jumlah Warga Asing dan Pribumi Lainnya di Sabang pada Tahun 1935**

Suku Bangsa	Jumlah
Pribumi lainnya	1400
Cina	1700
Jepang	30
Timur Asing lainnya	200
Eropa	170
Total	9400

Sumber: De Vos, (1935: 7)

Jumlah ini tidak termasuk  $\pm$  1.350 orang yang berada di Rumah Sakit Jiwa. Rumah Sakit Jiwa ini mulai sering digunakan pada tahun 1930. Bangunannya yang terdiri dari dapur dan kantor juga digunakan untuk tentara dan angkatan laut pribumi. Rumah sakit jiwa ini dilengkapi dengan tim dokter militer, dokter sipil, dokter gigi, apoteker dan tenaga labor. Rumah sakit dapat menampung 40 pasien rawat inap dari masyarakat umum. Juga terdapat kamar bayi dan kamar pasangan untuk menginap bagi orang-orang Indonesia yang melahirkan (der Veen, 1990: 104).

Jumlah penduduk mayoritas kedua adalah orang Cina. Sukar untuk menentukan secara pasti tahun kedatangan mereka pada mulanya ke pulau ini. Yang jelas tidak lama setelah selesainya pembangunan *kolenstation* oleh firma *De Lange & Co* serta dibukanya Sabang sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1896, Sabang Maskapai banyak mempekerjakan buruh yang terdiri atas orang Cina yang didatangkan dari luar negeri terutama dari

Singapura, Hongkong dan Makau. Mereka dijadikan kuli untuk memindahkan batu bara dari tempat penimbunannya di pelabuhan ke kapal bersama buruh-buruh dari Jawa dengan menggunakan cara kuno yaitu diangkut dengan keranjang kecil. Pada tahun 1904 dan 1905 telah digunakan 5 troli listrik, hal ini membuat penghematan luar biasa karena mengurangi tenaga kerja dan upah yang membawa keuntungan besar bagi perusahaan (De Boer, 1924: 26). Kuli-kuli Jawa dan Cina juga bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu dan tukang besi di pelabuhan. Mereka didatangkan oleh pemborong Yung A Nyam dan Sin So yang mendapatkan kuasa dari Sabang Maskapai. Selain itu juga didatangkan orang Arab yang dipekerjakan untuk memasukkan batu bara ke dalam tunggunya karena menurut mereka orang Arab tahan lama bekerja dekat tungku yang panas di kapal (Ismail, 1988: 105-106).

Kedatangan buruh-buruh dari Singapura sering mengecewakan kepala-kepala kampung, karena banyak dari mereka memakai opium. Kuli-kuli bebas dapat mengatur waktu kerja mereka, dan tentunya perusahaan juga menyesuaikan waktu kerja dengan upah yang akan mereka terima. Untuk mengaktualisasikan kehidupan sosial mereka, maka beberapa kelompok kuli sering mengadakan acara selamatan dalam kehidupan sehari-harinya (De Boer, 1924: 30).

Sebagian buruh dari Jawa umumnya datang dari daerah yang padat penduduknya, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedatangan mereka ke Sabang melalui agen pencari tenaga kerja dari Sabang Maskapai dengan menaiki kapal yang telah disediakan perusahaan tersebut. Kesulitan hidup di daerah asal membuat mereka menaruh harapan dapat mengubah nasib menjadi lebih baik di daerah baru. Sebagian besar buruh-buruh dari Jawa ini selain bekerja dalam bidang pekerjaan yang disebutkan di atas, juga memuat barang-barang dan mengangkat air bersih dari pelabuhan ke kapal,

bekerja di bengkel, di mercusuar, di dok-dok dan sebagai penyelam pada Sabang Maskapai.

Pada tahun 1924 pemerintah Hindia Belanda mengirim orang-orang hukuman dari Jawa dengan kapal *Van Noort*, mereka ditempatkan dan dipekerjakan di Sabang dengan dijaga oleh tetara KNIL (*Koninklijk Nederlandsch Indische Leger*). Tentara KNIL pribumi umumnya adalah orang-orang Ambon, Manado, dan Nusa Tenggara Timur. Pengerahan semacam ini berhubungan dengan kenyataan bahwa mereka sebagian besar beragama kristen, yang dalam hal kebudayaan mereka sama dengan orang Eropa (Naim, 1984: 27). Mereka tinggal di barak-barak militer yang letaknya berdekatan dengan tempat tinggal orang Eropa.

Orang-orang Cina umumnya bertempat tinggal di sekitar pasar sesuai dengan pekerjaan mereka sebagai pedagang. Pemerintah Hindia-Belanda mengangkat seorang letnan Cina yang berfungsi sebagai kepala ikatan orang-orang Cina yang bertugas mengurus kepentingan orang-orang/buruh-buruh Cina mereka mendapat tunjangan dari pemerintah Belanda sebesar £ 50, dulunya £ 75,-. Dalam bidang perdagangan, nyonya-nyonya Cina berperan sebagai penyedia barang-barang kelontong/kebutuhan sehari-hari, juga menjual pakaian, taplak meja Cina, permadani, serbet, selendang, seprei, dan sebagainya (Der Veen, 1990: 86). Bidang perdagangan bebas memang berada di tangan orang Cina. Perdagangan gela (smokel) terhadap barang-barang, seperti: gula, beras, alkohol, minyak wangi dan tembakau banyak mereka lakukan yang dengan mudah diperoleh dari para turis dan kapal-kapal yang berlabuh dan melakukan bongkar muat. Kegiatan impor dan perindustrian dilakukan oleh firma-firma Eropa, pada tahun-tahun terakhir ada beberapa industri kecil milik orang Cina dan Melayu. Sementara penduduk pribumi setelah selesai masa kejayaan berkebun merica, mereka berkebun kelapa dan berladang, sedangkan bersawah tidak begitu berhasil. Di samping itu, penduduk

pribumi juga bekerja sebagai nelayan, bertenak unggas, menanam sayur-sayuran, pinang, pohon kapuk dan pisang. Pisang kemudian banyak diekspor ke Eropa. Pada tahun 1934 dari pulau ini berhasil diekspor ± 3.500 kg merica, 1.300 pikul kopra dan 250 pikul pinang (De Vos, 1935:10-13).

Dalam kehidupan beragama sebagian besar penduduk beragama Islam, kecuali pegawai-pegawai dari rumah sakit jiwa dan dari militer beragama Katolik dan Protestan. Orang-orang Aceh adalah penganut Islam yang fanatik, sementara orang-orang Melayu terutama yang datang dari Sumatera Tengah tekun dalam menjalankan perintah agamanya. Kehidupan antarumat beragama dari berbagai suku bangsa berjalan damai, tidak pernah terjadi bentrokan. Bahkan banyak orang-orang Nias dan orang dari Timor yang tertarik untuk mempelajari agama Islam di *meunasah-meunasah*.

Pada abad ke-20 keadaan kesehatan para buruh sangat buruk, sebaliknya kondisi kesehatan orang Eropa sangat memuaskan. Pada bulan pertama tahun 1905 sebanyak 43 buruh meninggal karena kecanduan opium, diperburuk lagi karena korban menderita penyakit beri-beri dan malaria, sebagian besar mereka adalah yang datang dari Singapura. Kelambu yang dikirim dari Singapura untuk mereka, mereka jual dengan harga murah untuk membeli opium. Untuk mengatasi hal ini pihak maskapai memberikan hukuman yang berat bagi buruh pengguna opium, sehingga banyak di antaranya melarikan diri, baik buruh asal Singapura maupun yang datang dari Jawa. Penderita beri-beri yang disertai demam yang sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kematian. Tahun 1910 setelah adanya penemuan baru oleh Prof. Eijkman dari Utrech dan Dr. Van Dieren terhadap penyakit beri-beri, penderita beri-beri dapat disembuhkan dengan cara sederhana yakni dengan memberikan makanan yang cukup mengandung bekatul, hal ini sangat berhasil ketika diterapkan di Sabang

Maskapai. Pada tahun 1916 terjadi epidemi Malaria di Pulau Weh. Untuk memberantasnya diadakanlah operasi “brigade nyamuk” dengan memusnahkan sarang-sarangnya, seperti genangan air di rawa-rawa dan kaleng-kaleng bekas minyak tanah. Penderita kedua penyakit ini dirawat dengan dikarantina dan diberi makanan yang tepat. Bagi penderita malaria mendapat obat *prophyloctische chinine* (De Boer, 1924: 30).

Pecahnya perang dunia II mengakibatkan banyak orang Cina kembali ke Singapura dan sebagiannya menuju daratan Aceh. Mereka yang tetap tinggal membuka usaha kecil-kecil seperti berjualan kelontong, rempah-rempah, ikan asin, warung kopi, tukang jahit, tukang sepatu, dan tukang botol. (Ismail, 1988: 106). Sementara penduduk pribumi banyak yang menyelamatkan diri ke gunung (pedalaman). Orang-orang Nias melarikan diri ke Paya Seunara menjadi petani di sana sehingga ada tempat yang bernama Gunung Sitoli, sedangkan orang-orang Eropa menjadi tawanan Jepang yang dikirim ke kamp-kamp internir di Kutaraja kemudian dipindahkan dengan angkutan kereta api dan truk ke kamp-kamp internir di Medan. Kamp-kamp internir tersebut dipisahkan antara kamp wanita dengan pria.

Jepang pertama kali melakukan serangan udara ke Sabang pada tanggal 18 Januari 1942 dan setelah itu terjadi pemboman berkali-kali dengan frekuensi sampai lima hari serangan dalam seminggu sehingga kemudian mereka berhasil menduduki pulau tersebut. Pemboman yang terus menerus itu berhasil melumpuhkan berbagai sendi kehidupan terutama dalam bidang perekonomian (Piekar, 1998: 226-228). Sebenarnya sebelum tentara pendudukan Jepang menduduki pulau ini, telah ada mata-mata Jepang di sana. Mereka membuka toko-toko dan studio foto. Setelah Jepang masuk, Kota Sabang menjadi sunyi. Rumah-rumah bagus milik orang Eropa ditempati tentara pendudukan Jepang. Tangki-tangki minyak dan lapangan terbang ditata ulang oleh Jepang. Mobil-mobil yang tersisa

masih dapat mereka jalankan walaupun dengan bahan bakar kerosin, karena persediaan bensin telah dihabiskan oleh Belanda (sebelum Jepang menduduki Sabang, Belanda telah merusak sebagian besar instalasi pelabuhan, sentral radio dan telegraf, tangki-tangki minyak, kantor dan gudang dari Sabang Maskapai), sedangkan rumah sakit jiwa dijadikan asrama angkatan Laut Jepang (Deer Veen, 1990: 158-167).

Sabang dijadikan pusat pertahanan Jepang yang harus dilengkapi dengan benteng-benteng pertahanan di sekeliling Sabang, membangun jalan-jalan dan lapangan terbang. Untuk membangun sarana pertahanan ini Jepang memerlukan banyak tenaga yang umumnya didatangkan dari Jawa dan Sumatera Utara dengan janji mereka akan memperoleh upah, tempat tinggal dan fasilitas hidup yang mencukupi dan untuk mereka dinamakan Jepang “prajurit kerja”, padahal sebenarnya adalah tenaga kerja paksa (romusha) untuk kepentingan tentara pendudukan Jepang. Banyak romusha yang tergiur dengan janji-janji Jepang ini karena mereka di daerah asalnya juga mengalami kesulitan hidup dan sebagian lagi karena terpedaya, ditangkap ketika mereka keluar dari gedung bioskop ataupun ditangkap ketika berada di jalan atau sedang membajak di sawahnya. Kenyataan di lapangan ternyata jauh berbeda dari yang diharapkan. Oleh pemerintah Jepang mereka ditempatkan di bedeng-bedeng dengan makanan yang jauh dari cukup, pakaian dari goni, tidak ada fasilitas kesehatan, sementara kondisi lingkungan tidak sehat, dan upah yang diterima pun sedikit sekali. Walaupun banyak para romusha yang didatangkan ke Sabang, tetapi akibat kerja berat dan tidak cukup istirahat serta kondisi yang demikian banyak diantara mereka yang menderita sakit, terutama penyakit beri-beri, busung lapar dan malaria yang akhirnya membawa kepada kematian. Selain pria didatangkan juga tenaga kerja wanita yang bekerja di dapur-dapur umum Jepang. Pada masa akhir pendudukan Jepang di Sabang banyak di antara mereka menyerahkan anaknya kepada penduduk setempat karena kesulitan penghidupan. Situasi pada Perang

Dunia II sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk di Sabang seperti digambarkan pada tabel 15 berikut ini.

**Tabel 15**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk di Sabang**  
**Berdasarkan Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan	1915	1930	1935	1946
Eropa	129	289	278	125
Pribumi	3149	4907	7200	3822
Cina	1297	1488	1700	1098
Jumlah	4575	6684	9178	5045

Sumber: Der Veen (1990)

Pada tahun 1946 terdapat jumlah laki-laki dua kali jumlah perempuan. Di samping jumlah dalam tabel 13, terdapat ± 500 tawanan Jepang dan 1500 orang lebih pendudukan militer (der Veen, 1990: 156).

## **2. Sabang pada Masa Revolusi Kemerdekaan**

Sabang termasuk daerah Aceh yang berhasil diduduki sekutu/Belanda selama revolusi kemerdekaan. Sabang apabila dilihat dari segi kemiliteran sangat strategis, sebagai basis pertahanan terdepan dari arah Barat Laut Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan, apabila Jepang saat menjelang kekalahannya menempatkan kira-kira 10.000 kekuatan tentaranya di bawah komando *Vice Admiral* Hirose. Demikian pula dengan

tentara Sekutu/ Belanda, pertama-tama perhatiannya di arahkan ke Sabang tersebut.

Pada 25 Agustus 1945 armada sekutu yang terdiri atas beberapa kapal perang Inggris telah berada di muka pelabuhan Sabang. Dalam pasukan ini ikut serta Kesatuan Marine Belanda dan juga Pemerintah Belanda yang menjadi bagian dari AMACAB (*Allied Military Administration Civil Affair Branch*). Pada hari itu juga Hirose menyerah terimakan Pulau Weh (Sabang) kepada sekutu yang disusul dengan pendaratan tentara serta pengibaran bendera Inggris dan bendera Belanda di kota pelabuhan tersebut. Kemudian, untuk menggerakkan administrasi pemerintahan di Pulau Weh ditetapkan seorang perwira Belanda, Letnan Hamers yang bertindak atas nama pemerintah sekutu, tetapi dengan tidak langsung, seperti ternyata atas nama Pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu diperintahkan pula agar Jepang segera mengembalikan ribuan kuli, yang berasal dari daerah Aceh, Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara) dan Tapanuli dan yang selama ini bekerja sebagai romusha di Sabang, ke tempat asal mereka masing-masing (Sufi, 1996: 45).

Pada tanggal 29 Agustus 1945 Sekutu memanggil *Guntyo* Sabang, Teuku Abaih, untuk diberitahukan bahwa Jepang telah menyerah dan karenanya Pulau Weh telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hubungan ini, Teuku Abaih, sebagai kepala pemerintahan angkatan Jepang khususnya dan rakyat pada umumnya, mengingat kekuatan tentara sekutu dan Jepang besar di Sabang, tidak mungkin melakukan apa-apa selain menerima pemerintahan tentara sekutu tersebut. Sejak itu, dengan dukungan Sekutu, pemerintah NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) mulai dirintis di Pulau Weh. Sejak tanggal 3 September 1945, Letnan Hamers, yang selama ini bertindak atas nama Sekutu, digantikan oleh seorang pegawai NICA bernama C.A. Sani dalam kedudukannya sebagai *commanding officer*. Untuk melakukan tugasnya

sehari-hari, C.A. Sani dibantu oleh seorang kepala PID (*Politieke Inlichtingen Diens*) yang bernama Emiel Daniel. Keadaan yang demikian itu berjalan sampai tahun 1949 setelah ditandatangani perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Belanda.

Pada tahun 1953 di Aceh terjadi gerakan DI/TII, yang dipelopori oleh tokoh-tokohnya, antara lain Teungku Daud Beureueh, Husen Al-Mujahid, Hasan Saleh dan lain-lain. Munculnya gerakan DI/TII tersebut akibat dari beberapa kekecewaan rakyat Aceh kepada pemerintah pusat, walaupun kemudian menjadi alasan yang kompleks. Setelah beberapa kali pertemuan rahasia yang diadakan oleh Teungku Muhammad Daud Beurueh dan teman-temannya, pada tanggal 20 Desember 1953 (tengah malam), terjadilah gerakan Darul Islam Aceh dengan diproklamasikan berdirinya Darul Islam Aceh. (Ismail, 1994: 51). Dengan demikian, dimulailah gerakan DI/TII di seluruh Aceh.

Gerakan DI/TII tersebut, tidak terkecuali juga terjadi di Sabang. Di Sabang, Komandan DI/TII adalah Ramli Haji dan Teuku Tjut Hasan sebagai wakil komandan. Gerakan DI/TII di Sabang, seperti yang dikisahkan oleh Ramli Haji dan Teuku Tjut Hasan, tidak ada peperangan atau kontak senjata yang terjadi antara pasukan DI/TII dengan aparat keamanan. Hal tersebut, dikarenakan umumnya masyarakat Sabang pada waktu itu mendukung DI/TII, di samping itu pasukan DI/TII tidak melakukan destruktif yang mengganggu aparat keamanan dan kepentingan umum. Berakhirnya DI/TII di Sabang bersamaan dengan di daerah lainnya, khususnya setelah diadakan Ikrar Lam Teh.

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan saja mengubah struktur pemerintahan daerah jajahan kepada Pemerintah Negara RI yang merdeka dan berdaulat, tetapi lebih dari itu. Dalam pasal 27 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, maka hal ini mengubah segala sendi

kehidupan dan masyarakat. Pemukiman-pemukiman di Sabang yang dahulunya bersifat homogen, maka mulai berubah dan pimpinan dari daerah itu pun dipilih dan diangkat. Pimpinan itu tidak lagi harus dari kelompok masyarakat asli Sabang. Hal itu terjadi karena kesadaran akan rasa kebangsaan yang telah mulai memasyarakat sehingga pembauran mulai berlangsung. dengan demikian, ciri-ciri kehidupan kelompok yang ada di Sabang tidak kelihatan.

Pada daerah pemukiman orang-orang Cina, Jawa, Nias, Arab dan Lain-lain, lahirnya kemerdekaan dan lenyapnya peranan penjajahan dalam bagian perekonomian, mereka dapat merubah kehidupan sosial dengan lebih baik. Dengan kerajinan dan ketekunan dan sifat wiraswasta yang merupakan salah satu modal berusaha, dari pedagang dan usaha kecil-kecilan kemudian banyak yang menjadi kelas menengah dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan perekonomian tersebut mengharuskan mereka melakukan perubahan tata kehidupan sesuai dengan perkembangan ekonominya.

Pada masa kolonial, para migran yang ada di Sabang memperoleh nafkah dari upah yang diperoleh dari perusahaan maskapai Belanda. Setelah penjajahan tidak ada lagi, para migran tersebut ada yang kembali ke daerahnya masing-masing dan ada yang menetap di Sabang. Mereka yang menetap di Sabang tersebut umumnya bekerja sebagai pedagang, baik dalam ukuran besar maupun kecil-kecilan karena memang lahan untuk bertani di Sabang sangat sedikit.

Pada masyarakat yang menggantungkan kelangsungan hidupnya seperti di atas tentunya sangat tergantung antara satu dengan yang lain, perasaan bersaudara dan komitmen para migran dengan anggota masyarakat di sekitarnya sangat dibutuhkan. Namun demikian, perasaan komitmen tersebut bervariasi sesuai dengan kemungkinan kembali daerah

asal bagi seorang migran. Di pihak lain kemungkinan itu sendiri erat kaitannya dengan tipe masing-masing migran.

Para migran yang ada di Sabang setelah kemerdekaan bertempat tinggal menyebar. Pola tempat tinggal yang demikian ini berkaitan erat dengan awal terjadinya proses migrasi. Para migran tersebut kebanyakan dari mereka dahulunya orang-orang yang diangkut oleh Belanda dan Jepang, dan ditempatkan pada satu tempat tertentu. Setelah Belanda dan Jepang keluar, maka mereka menyebar ke berbagai daerah di Sabang.

Setelah kemerdekaan, kelompok suku Aceh berusaha untuk menempati kedudukan dominan dalam masyarakat Kota Sabang, dengan menempatkan kebudayaan Aceh sebagai basis ideologi “pembauran”. Anggota-anggota kelompok suku bangsa pendatang dituntut untuk melakukan asimilasi dengan kelompok suku Aceh Sabang. Akan tetapi, mereka hidup sebagai orang Indonesia, berbahasa Indonesia, memakai adat-istiadat campuran. Namun demikian, budaya Aceh dalam kehidupan sehari-hari tetap dominan.

Kontak, percampuran dan pembauran suku bangsa pada masa kolonial berada pada taraf yang minim. Faktor “keterpaksaan” lebih menonjol daripada unsur kesukarelaan. Akan tetapi, setelah merdeka atau setelah penjajahan Belanda dan Jepang keluar dari Sabang, maka kontak dan pembauran pun tidak dapat dihindarkan karena mereka terutama Jawa, Nias, Cina dan lainnya tidak tergantung lagi pada penjajah. Dengan demikian, hubungan timbal balik dan kerjasama terjadi selama hal itu merupakan keharusan yang tidak mungkin dihindarkan dalam rangka kepentingan individu dan kelompok.

Kemajemukan tersebut, seperti yang dikatakan oleh Syaifudin (1987), merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena terdapat keanekaragaman unsur penyusun masyarakat, yakni suku bangsa,

agama dan golongan sosial lainnya. Ciri-ciri lainnya adalah kecenderungan yang kuat untuk memegang identitas dari golongan sosialnya masing-masing. Orientasi yang kuat ke dalam golongan sendiri memberikan isyarat mengenai pekanya hubungan antargolongan sosial dalam masyarakat tersebut. Koentjaraningrat (1976) mengemukakan bahwa kepekaan dalam hal interaksi antara individu dari berbagai suku bangsa, agama, keturunan dan daerah masih ada secara laten dan terpendam dalam masyarakat bahwa masih ada rasa curiga yang didasari interaksi antara individu yang berasal dari berbagai golongan tersebut. Rasa curiga ini didasari oleh stereotipe etnik yang diwarisi sebelumnya dan juga disebabkan oleh penjajahan.

### **3. Sabang pada Masa Pelabuhan Bebas**

Sejak tahun 1884 Belanda telah merencanakan untuk mendirikan suatu *kolen station* di Balohan, Sabang. Rencana ini pada tahun 1887 oleh Firma *Delange* mulai dibangun dengan mendapatkan bantuan dari Sabang Maskapai (*Haven Nederlandsche Handelmaatschapij*). Pada tahun 1895 *kolen station* selesai dibangun dan setahun kemudian Sabang resmi dibuka sebagai pelabuhan bebas (1896). Pengaturan serta pengurusan administrasi pelabuhan bebas pada waktu itu diserahkan kepada suatu badan yang bernama *Maatschapij Zeehaven en Kolen Station* atau yang lebih dikenal dengan *Sabang Maatschapij* (Mahmud, et al., 1968: 5).

Pelabuhan bebas tersebut, pada mulanya berfungsi hanya untuk melayani keperluan bahan bakar berupa batu bara dan air minum bagi kapal-kapal laut yang pada waktu itu masih menggunakan mesin uap. Akan tetapi, dalam perkembangan lebih lanjut ternyata Sabang telah menjadi suatu *trading area* yang penting serta cukup sibuk pada waktu itu (B. Labre, 1984: 17).

Pada tahun 1909 *Sabang Maatschappij* mengembalikan segala harta miliknya kepada pemerintah Hindia Belanda, tanpa ada alasan-alasan pengembalian tersebut. Beberapa waktu kemudian dikembalikan lagi kepada *Sabang Maatschappij* sebagai pacht untuk jangka waktu 50 tahun. Berdasarkan hak pacht ini berarti jangka waktu pelabuhan bebas Sabang baru akan berakhir pada tahun 1960.

Pada tahun 1942 Sabang diduduki oleh Jepang. Selama pendudukan Jepang (1942-1945) pelabuhan bebas Sabang ditutup, pada akhir tahun 1945 tersebut, Sabang mengalami kehancuran fisik akibat pemboman tentara sekutu dalam usaha memenangkan perang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka, tetapi Sabang masih diduduki oleh Belanda sampai tanggal 29 Desember 1949 (KMB). Pada tahun 1950, dengan Ketetapan Menteri RIS (Republik Indonesia Serikat) No. 9/MP/1950 Pulau Weh diserahkan kepada Angkatan Laut RIS untuk dijadikan pertahanan maritim. Kemudian, semua hak milik *Sabang Maatschappij* dibeli oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu dengan harga satu juta gulden.

Pada bulan Maret 1963, tim penelitian dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPES) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala bekerja sama dengan gabungan pengusaha ekspor Sumatera membuat penelitian tentang kemungkinan pembukaan kembali Sabang sebagai pelabuhan bebas. Atas dasar penelitian itu, pemerintah daerah Aceh mendesak pemerintah pusat di Jakarta untuk membuka kembali status Sabang sebagai pelabuhan bebas. Bertepatan dengan situasi politik pada waktu itu, Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura pada bulan September tahun 1963 yang menyebabkan dipercepatnya penetapan Sabang sebagai pelabuhan bebas sebagai kelanjutan dari rekomendasi yang sedang diproses pada waktu itu oleh pemerintah pusat.

Akhirnya pada 16 Oktober 1963 dengan Ketetapan Presiden No. 10 Tahun 1963 kepada Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE), Sabang ditetapkan sebagai pelabuhan bebas. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 22 tahun 1964 Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang (KP4BS) dibentuk dan diserahkan tugasnya pada suatu badan yang mengelolanya. Sesuai dengan cirinya setiap pelabuhan bebas, telah pula ditetapkan bahwa pelabuhan bebas Sabang merupakan daerah luar pabean Indonesia, daerah luar rezim devisa dan daerah luar perpajakan bea dan cukai Indonesia.

Semenjak tahun 1970 sejarah perjuangan Sabang memasuki fase baru. Rancangan undang-undang yang mengatur tentang status Sabang yang telah lama terkatung-katung telah diserahkan oleh DPR-GR, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 tentang daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.

Seperti yang diketahui bahwa Sabang telah berkembang berdasarkan Penetapan Presiden No.10 Tahun 1963 dan Peraturan Presiden No.22 Tahun 1964, selama 6 tahun lebih Sabang telah berkembang sebagai salah satu *Leverage Centre* Ekonomi Nasional, khususnya perekonomian daerah hinterlandnya, tanpa suatu garansi objektif yang dilindungi oleh undang-undang (Djamaluddin, 1971: 5).

Untuk mengadakan persiapan terakhir, maka pada tanggal 25 Juni 1969 tiba di Sabang satu rombongan yang berjumlah 26 orang yang terdiri atas tim pemerintah yang diketuai oleh Prof. Dr. Subroto dengan jumlah anggota 12 orang, dan tim DPR-GR, yang diketuai oleh M. Kasim AS dengan jumlah anggota 12 orang pula. Keadaan yang demikian mencapai puncaknya ketika pada 23 Desember 1969 Presiden Soeharto dan beberapa menteri dan pejabat negara lainnya mengunjungi Sabang. Akhirnya, pada

27 Maret 1970, keluar Undang-Undang No. 3 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 tentang daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.

Untuk menyelenggarakan pembangunan proyek pelabuhan bebas Sabang, telah dibentuk sebuah badan yang disebut Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang (KP4BS). Badan ini bertugas menyelenggarakan pembangunan dan bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan proyek pelabuhan bebas Sabang tersebut, seperti telah disebutkan di atas.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 3 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 tentang daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang pada pasal 6, bahwa fungsi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah:

1. Mengusahakan persediaan (*stockpiling*) barang-barang konsumsi dan produksi untuk perdagangan impor, ekspor, re-ekspor maupun industri,
2. Melakukan peningkatan mutu (*upgrading*), pengolahan (*processing*), produksi (*manufacturing*), pengepakan (*packing*), pengepakan ulang (*repacking*), dan pemberian tanda dagang (*marking*),
3. Menumbuhkan dan mengembangkan industri, lalu lintas perdagangan dan perhubungan,
4. Menyediakan dan mengembangkan prasarana dan memperlancar fasilitas pelabuhan, mengembangkan pelabuhan, pelayaran, perdagangan transit dan lain-lain,

5. Mengusahakan pengembangan kepariwisataan dan usaha-usaha ke arah terjelma dan terbinanya shopping centre, dan
6. Mengusahakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya khususnya dalam sektor perdagangan, maritim, perhubungan, perbankan dan perasuransian (Djamaluddin, 1971: 14).

Di Balohan, sekitar pelabuhan bebas mulai pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 10.00 WIB, masyarakatnya sangat sibuk, dan sesudahnya kebanyakan mereka mengisi waktu dengan berbagai macam kegiatan. Misalnya, ada yang ke kebun, ke pasar, dan sebagian mengisi waktunya dengan bermain domino, catur di depan warung-warung kopi ataupun di rumah-rumah tertentu. Pada sore hari mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 keadaan mulai ramai kembali dengan tibanya ferry dari Krueng Raya dan Ulee Lheue. Di Kota Bawah Barat sepanjang hari sangat sibuk, terutama di sekitar Jalan Perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang. Hal seperti itu juga terjadi di Kota Bawah Barat. Suasana malam hari di Balohan relatif sepi dan sunyi mengingat penerangan listrik belum dimanfaatkan oleh penduduk, sedangkan Kota Bawah Barat sangat ramai karena pusat pertokoan dan hiburan berada di sekitarnya. Di samping itu, para pedagang sibuk berbelanja atau mengambil barang-barang pada toke langganannya dan mempersiapkan barang-barang dagangannya untuk dibawa keesokan harinya. Pada bulan-bulan Februari sampai dengan Maret, siang dan malam di sekitar Jalan Perdagangan semakin ramai, karena masyarakat dalam masa panen cengkeh, sehingga animo yang berbelanja dan pengunjung tempat hiburan semakin padat.

Pada masa pelabuhan bebas tersebut mulai berdatangan “*jenggo-jenggo ekonomi*”, terutama *inang-inang*. Diberikan dengan julukan tersebut karena dilihat dari pola pekerjaan mereka yang mempunyai ciri-ciri antara lain: keberanian, keuletan dan ketekunan, serta upaya berdagang untuk

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tidak mau mematuhi peraturan-peraturan retribusi yang berlaku, baik di daerah pabean, maupun di luar daerah pabean Indonesia. Kebanyakan orang yang mula-mula merintis pekerjaan *jengek* tersebut adalah *inang-inang* dari daerah Tapanuli atau suku Batak (B. Labre, 1984: 33). Mulai tahun 1969 mereka mempraktikkan *jengek* di Sabang. Kemudian melihat pola pekerjaan ini sangat menguntungkan, maka membawa pengaruh kepada masyarakat khususnya dan daerah Aceh pada umumnya untuk mulai mengikuti pola pekerjaan tersebut. Mulai dari orang tua, para pensiunan, ABRI, pegawai bahkan anak-anak maupun orang cacat mulai beramai-ramai mengisi kesempatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan keadaan dan situasi seperti itu, maka pada tahun 1970 istilah *jengek* mulai populer di kalangan masyarakat Sabang dan Badan Aceh (Ismail, 1979: 33).

Pada waktu itu, praktik-praktik *jengek* dapat dikategorikan dalam 4 jenis, yaitu bermodal, *jengek* tanpa modal, *jengek* campuran, dan *jengek* pancung. *Jengek* bermodal adalah sekelompok *jengek* yang langsung membeli barang-barang di Sabang dengan menggunakan modal sendiri. *Jengek* tanpa modal adalah sekelompok *jengek* yang mendapat kepercayaan dari toke-toke Cina untuk membawa barang-barang dari Sabang ke Banda Aceh, kemudian mendapatkan uang imbalan sesuai dengan nilai barang dan jumlah barang yang dibawanya. Pengambilan barang tersebut berdasarkan nota pesanan dari Banda Aceh kepada toke-toke di Sabang. Dalam praktiknya mereka biasanya mempergunakan *jengek-jengek* pembantu kemudian mendapatkan perongkosan sesuai dengan peraturan yang berlaku di antara mereka. *Jengek* campuran adalah sekelompok *jengek* yang di samping membawa dagangannya sendiri juga membawa perongkosan dari *jengek* tanpa modal atau *jengek* kepercayaan, kemudian mendapatkan uang imbalan perongkosan. Sedangkan *jengek* pancung adalah sekelompok *jengek* yang tugasnya membawa barang-barang kepunyaan *jengek*

kepercayaan toke, terbatas hanya dari luar pelabuhan sampai ke dalam pelabuhan saja atau sebaliknya, kemudian mendapatkan imbalan sesuai dengan jumlah nilai barang yang dibawanya.

Sabang dengan statusnya sebagai pelabuhan bebas sejak dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1963, ternyata telah banyak menarik perhatian para pengusaha, baik dari Aceh maupun daerah-daerah lain untuk membuka usaha dagang. Minat yang sangat besar dari pengusaha-pengusaha tersebut disambut baik oleh masyarakat Aceh (Sabang). Hal itu dikarenakan sangat menguntungkan bagi pengembangan daerah Sabang sendiri dan pembangunan daerah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh pengusaha-pengusaha pribumi maupun pengusaha-pengusaha dari golongan etnis Cina. Golongan etnis Cina berusaha dan berdagang sudah merupakan suatu mata pencaharian hidup yang penting.

Pengusaha-pengusaha pribumi ternyata memiliki kesempatan yang lebih baik sebagai akibat diberlakukannya PP No. 10 Tahun 1959 yang melarang berusaha bagi pedagang-pedagang Cina WNA di desa-desa. Bentuk-bentuk perusahaan, seperti PT, CV, Firma yang bergerak di bidang ekspor dan impor mulai bermunculan. Pada tahun 1964 terdapat 6 buah perusahaan dagang yang bergerak di bidang ekspor dan impor, semuanya milik perusahaan pribumi. Pada tahun 1965 bertambah menjadi 22 buah (*Pelabuhan bebas Sabang*, 1967: 65-70).

Keadaan pengusaha-pengusaha pribumi menguasai perdagangan impor dan ekspor ini berjalan sampai tahun 1967. Sebelum tahun ini pedagang-pedagang Tionghoa di Kota Sabang belum lagi berani meningkatkan usahanya di dalam perdagangan karena masih khawatir dan bersikap hati-hati akibat aksi massa pada tahun 1966 yang menyebabkan sebagian besar orang-orang Tionghoa diusir dari Aceh. Baru pada tahun

1967 bermunculan perusahaan-perusahaan milik Cina bergerak di bidang ekspor dan impor.

Seiring dengan bermunculannya pedagang-pedagang dari golongan etnis Tionghoa yang bergerak di bidang ekspor dan impor, pedagang-pedagang pribumi menjadi semakin mundur, satu per satu mulai menghentikan kegiatannya. Di samping itu, status perdagangan bebas sesuai dengan Undang-Undang No. 3 dan No. 4 Tahun 1970 telah menciptakan pola perekonomian yang berorientasi kepada ekspor dan impor. Keadaan ini ternyata telah menempatkan para pedagang yang mengatur arus perdagangan dalam posisi yang istimewa dan sangat menguntungkan.

Keadaan ekspor dan impor menunjukkan peningkatan setiap tahun. Kegiatan di sektor perdagangan ini ternyata telah membawa pengaruh yang besar terhadap lapangan penghidupan lainnya. Pertambahan penduduk di Kota Sabang dari tahun ke tahun meningkat dengan tinggi sebagai akibat adanya mobilitas penduduk berupa migrasi dari daerah lain ke Sabang. Di samping mobilitas penduduk berupa migrasi dengan tujuan untuk menetap, maka didapati pula mobilitas penduduk bentuk lain, yaitu berupa *commuting*. *Commuting* adalah mobilitas penduduk yang melintasi suatu batas wilayah (Sabang) dalam jangka waktu minimal 6 jam dan kembali pada hari yang sama (Prisma, 1979: 74).

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi dan Pluralitas Masyarakat**

Masyarakat majemuk atau pluralitas dimungkinkan oleh adanya perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain di luar dari daerah kebudayaan setempat, atau yang lebih dikenal dengan migrasi. Migrasi timbul disebabkan oleh adanya faktor-faktor dari dalam dan luar masyarakat yang menggerakkan mereka untuk melakukan migrasi. Dengan demikian, migrasi bukanlah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan acak-acakan. Keputusan untuk melakukan migrasi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berasal dari kebudayaannya. Hal itu, karena kebudayaan manusia memiliki perangkat-perangkat model pengetahuan yang dipakai oleh manusia untuk memahami atau menginterpretasikan lingkungan alam maupun lingkungan sosial yang dihadapinya (Suparlan, 1987:106).

Pada saat manusia melakukan migrasi, kebudayaan sebagai sumber strategi adaptasi akan mempengaruhi pandangan-pandangan mereka tentang daerah yang menjadi tujuan, yang kemudian mempengaruhi proses dan corak dari adaptasi. Pertama-tama pandangan mereka tentang alam, masyarakat dan kebudayaan pada daerah yang menjadi tujuan, khususnya penduduk asli daerah setempat. Pandangan-pandangan ini akan menentukan dalam mereka mengambil keputusan untuk melakukan tindakan bermigrasi. Keputusan-keputusan tersebut akan menentukan pilihan daerah yang dituju, tempat tinggal, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, dan melakukan persiapan-persiapan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya pada daerah tujuan, seperti di Sabang.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli (Sabang) mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda. Kemampuan individu maupun kelompok untuk dapat berinteraksi terhadap kelompok lain dipengaruhi oleh banyak

faktor. Hal ini, didasarkan bahwa setiap individu tersebut tidak dapat hidup secara sendirian, tetapi harus hidup secara sosial atau kebersamaan dan saling ketergantungan. Di samping itu, adanya rasa toleransi atau saling menghargai yang sangat tinggi pada masyarakat Sabang tentang adanya keragaman budaya dan suku bangsa antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Hal ini, seperti dikatakan seorang informan (Poniman, 65 tahun):

“bahwa di sabang ini antara satu suku dengan suku lain tidak pernah terjadi permusuhan, kami di sini (Sabang) tidak membedakan lagi antara berbagai macam suku yang ada. Kami di sini lebih bangga menyebutnya orang Indonesia.”

Proses terjadinya pluralitas sosial merupakan suatu proses penyelesaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan sosial yang pluralisme dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya proses untuk melakukan pengenalan dengan kelompok yang berasal dari luar kelompoknya antara sesama imigran sejak mereka berada di tempat tujuan tersebut, dalam hal ini Sabang, yaitu dengan adanya kelompok migrasi dari daerah yang berbeda. Para migran dengan penduduk setempat dalam menjalin hubungan dengan semua kelompok tidak selalu memberikan perlakuan dan sikap yang sama. Faktor keyakinan merupakan salah satu faktor utama dalam memilih rekan untuk berinteraksi. Keadaan seperti itu hanya dalam hal-hal tertentu terjadi, karena pada masyarakat majemuk atau plural di Sabang umumnya dapat saling menyesuaikan diri antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain.

Proses interaksi itu sendiri harus memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Secara fisik kontak sosial terjadi apabila ada hubungan badaniah, tetapi sebagai suatu gejala sosial, kontak sosial tidak

perlu harus disertakan suatu hubungan badaniah, sebab orang dapat mengadakan hubungan dengan orang lain tanpa menyentuh (Soekanto, 1986: 54). Adapun komunikasi yaitu suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator, yang kemudian menimbulkan pengaruh tertentu.

Terjadinya migrasi dari suatu daerah ke daerah lain sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti yang terjadi di Sabang. Di antara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor politik atau kebijaksanaan pemerintah

“Dicari orang-orang yang rajin untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda di Sabang”, begitulah ucapan dalam pikiran orang Belanda yang ada di Sabang pada waktu itu. Pencarian tenaga kerja tersebut berkaitan dengan perusahaan-perusahaan Belanda di Sabang yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Kebutuhan tenaga kerja yang banyak tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja setempat. Oleh karena itu, mendatangkan tenaga kerja dari luar dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan ini.

Kebutuhan tenaga kerja tersebut, Belanda terpaksa mendatangkan orang-orang Jawa dan Nias dan lainnya untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaannya di kawasan kongsi di Sabang. Mereka tersebut dibawa oleh Belanda di luar kemauan sendiri dengan berbagai macam bujukan dan tekanan. Keadaan seperti itu, sesuai dengan pepatah Jawa “*mangan ora mangan sing penting ngumpul*” (makan tidak makan asalkan berkumpul). Keengganan mereka untuk bermigrasi secara sukarela selanjutnya dipertebal oleh kenyataan bahwa orang Jawa berdasarkan pada sistem kelas yang feodalistik. Dalam masyarakat seperti itu, kelas bawahan yang merupakan mayoritas merasa aman dan terlindungi oleh kelas atasan yang berkuasa.

Tenaga kerja yang didatangkan ke Sabang kebanyakan berasal dari Jawa dan Nias. Hal ini, menurut orang Belanda karena orang-orang Jawa dan Nias adalah orang yang rajin dalam melakukan setiap pekerjaan, dan mereka tidak begitu terikat dengan tinggi-rendahnya upah kerja. Itulah sebabnya Belanda mendatangkan tenaga kerja dari Jawa dan Nias. Hal itu sesuai dengan prinsip ekonomi bahwa dengan modal kecil memperoleh keuntungan yang banyak. Di samping itu, penduduk Jawa sudah padat, salah satu cara untuk menyebarkan penduduk adalah dengan memindahkan mereka ke tempat lain yang masih jarang penduduknya. Ini sesuai dengan program kolonisasi yang merupakan bagian dari kebijaksanaan politik etis pemerintah Belanda dengan mendatangkan tenaga kerja dari Jawa, yang diperkirakan akan mampu memperbaiki taraf hidup para migran tersebut.

Setelah Belanda keluar dari Sabang, masuk penjajahan Jepang. Pada masa Jepang juga banyak tenaga kerja yang didatangkan ke Sabang untuk membangun benteng-benteng pertahanan dalam rangka mengantisipasi serangan tentara Sekutu. Hal tersebut, seperti dikatakan oleh seorang informan (Teuku Tjut Asan, 75 tahun):

“Orang-orang Jawa dan Nias dan beberapa orang lainnya yang ada di Sabang ini, dahulunya adalah orang-orang yang didatangkan oleh Belanda untuk dipekerjakan di perusahaannya, karena mereka itu orang-orang yang rajin dalam bekerja. Sedangkan pada zaman Jepang juga banyak orang yang didatangkan ke Sabang untuk membuat benteng-benteng pertahanan”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa salah satu sebab mengapa orang-orang bermigrasi ke suatu daerah, karena adanya kebijakan pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Hal itu, seperti yang terjadi di Sabang, orang Jawa dan Nias dan yang lainnya yang ada di Sabang adalah “korban”

kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda dan Jepang yang memindahkan mereka ke daerah tersebut.

## **2. Faktor ekonomi**

Orang-orang akan berpindah, apabila keuntungan melebihi biaya. Maksudnya adalah harga saat itu dari tambahan yang potensial (pendapatan) yang didapatkan dari selisih antara pendapatan di tempat asal dengan pendapatan di tempat yang dituju. Keuntungan tersebut juga mencakup hal-hal yang non-moneter. Biaya yang dimaksud adalah biaya pindah, biaya peluang, pengorbanan psikis, yaitu kerugian psikis karena harus meninggalkan masyarakatnya serta penyesuaian diri dalam lingkungan baru yang asing baginya.

Orang-orang yang sudah tua biasanya tidak cenderung untuk pindah, karena usia hidup yang sudah singkat, terutama karena pengorbanan psikis lebih besar. Sebaliknya, orang-orang muda lebih mudah berpindah karena perbedaan pendapatan di tempat asal dan tempat tujuan lebih besar, pengertian dan kesadarannya lebih baik, hal itu akan mengurangi pengorbanan psikis tersebut.

Pada mulanya migrasi disebabkan oleh kebutuhan untuk mencari pekerjaan di luar daerah sendiri, yang membuat kaum pria meninggalkan keluarganya untuk jangka waktu tertentu. Apabila usaha baru itu sudah mulai berkembang, mereka lalu menjemput keluarganya dan mulai hidup baru di daerah tersebut. Untuk alasan-alasan tertentu kadang-kadang mereka tidak pergi sendirian, tetapi secara berkelompok. Dengan demikian, faktor ekonomi dapat dianggap yang utama terjadinya migrasi ke suatu daerah, karena salah satu alasan primordial untuk bermigrasi adalah perjuangan ekonomi. Orang-orang Minang selalu terdorong pergi ke daerah lain untuk mencari rizki, sehingga nantinya sanggup berdiri sendiri

dan menghidupi keluarganya. Hal tersebut, seperti dikatakan oleh seorang informan Datuk Saman (55 tahun):

“Saya datang ke Sabang ini sudah lama, dan tidak lain hanyalah untuk mencari rizki, yang nantinya dapat menghidupi kebutuhan keluarga”.

Bagi orang-orang Cina, keberandaanya di Sabang sulit untuk ditelusuri kapan mereka mulai masuk dan melakukan aktivitas ekonomi di Sabang. Beberapa orang yang diwawancarai selalu mengatakan bahwa

“Orang-orang Cina yang ada di Sabang ini sudah sejak lama, bahkan ketika kami kecil mereka sudah ada di sini”.

Seperti yang diketahui bahwa negara Cina termasuk negara yang terbanyak penduduknya, sehingga sangat berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Mengantisipasi sulitnya lapangan pekerjaan tersebut, maka mengembara ke berbagai negara untuk dapat berusaha dalam rangka kebutuhan ekonomi.

Golongan etnis Cina pada dasarnya bukanlah golongan pedagang, tetapi banyak faktor yang mereka temui di perantauan yang mendorong mereka untuk menjadi pedagang. Mereka yang datang ke Indonesia, Sabang khususnya banyak yang mengandalkan kemahiran dalam bidang pertukangan atau hanya bermodalkan kemauan untuk berusaha, akhirnya justru menjadi pedagang yang sukses.

Tentunya timbul pertanyaan mengapa pedagang etnis Tionghoa tersebut kebanyakan sukses di perantauan, khususnya di Sabang. Di bawah ini akan ditinjau beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi keberhasilan yang telah dicapai oleh pedagang Tionghoa tersebut. **Pertama**, tumbuhnya mobilitas idealisme dalam bentuk untuk mencapai

taraf kehidupan yang lebih baik daripada yang mereka peroleh selama ini di daerah asal, di negara luhur yang agraris ancaman bencana alam, terutama banjir sulit untuk mengandalkan kehidupan dari sektor pertanian, dan pertambahan penduduk pun mengancam semakin sempitnya pemilikan tanah.

**Kedua**, untuk menjawab tantangan itu, ajaran konfusianisme memberikan saluran guna merumuskan pandangan-pandangannya tentang dunia (*world view*), sebab pada dasarnya ajaran konfusianisme lebih banyak mengatur hubungan horizontal dan memberikan landasan moral bagi lembaga horizontal tersebut. **Ketiga**, *world view* tersebut ternyata memberikan peluang bagi munculnya etos kerja, seperti keuletan mereka dalam berusaha, rajin, tekun, dan giat bekerja. **Keempat**, adanya modal yang cukup dan juga disebabkan karena faktor-faktor lain yang berasal dari pihak pribumi dan pemerintah Hindia Belanda. Pihak pribumi misalnya dengan kekurangan modal, sehingga sulit untuk bersaing dengan pedagang etnis Cina. **Kelima**, pedagang-pedagang Cina hanya dapat mengembangkan usahanya di daerah-daerah yang penduduknya lebih cenderung untuk bercocok tanam. Di daerah-daerah yang penduduknya ulet dalam bidang perdagangan, mereka tidak dapat berkembang, misalnya di Sumatera Barat. **Keenam**, faktor dari pemerintah Hindia Belanda, antara lain adalah memberikan kedudukan lebih tinggi kepada golongan nonpribumi (Cina) daripada golongan pribumi.

Hal ini, seperti yang dikatakan oleh seorang informan (Ameng, 65 tahun):

“bahwa kami ke daerah ini untuk mencari penghidupan, kebetulan di sini kami mendapatkan peluang untuk berdagang, maka kami berdagang. Hal ini kami lakukan karena di daerah kami sudah terlalu banyak orang,

sehingga persaingan dalam lapangan pekerjaan semakin ketat. Oleh karena itu, kami mencari daerah-daerah yang ada tempat untuk berusaha”.

Faktor ekonomi menjadi pendorong migrasi apabila perimbangan antara sarana kelangsungan hidup dengan jumlah penduduk yang bergantung kepadanya mulai goyah. Hal ini, disebabkan penduduk terus-menerus bertambah, sedangkan sarana kelangsungan hidup relatif tetap konstan, sehingga jumlah yang bermigrasi menjadi meningkat. Selama struktur ekonomi yang ada tetap tidak berubah, penduduk yang ada di daerah itu berusaha mencari pekerjaan ke luar. Penduduk yang dengan kemauan sendiri bermigrasi akan membantu mengendorkan tekanan ekonomi di kampung, migrasi juga dapat membantu mengurangi dampak “kelebihan penduduk”.

Intensitas migrasi diukur dari sudut pandang ekonomi selalu berkaitan dengan sarana kelangsungan hidup subsistem yang ada, di samping tingkat kebutuhan itu sendiri. Akan tetapi, tergantung pada sarana kelangsungan hidup yang ada pada dasarnya sanggup menyediakan kebutuhan hidup bagi penduduk setempat. Apabila migrasi terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka lebih banyak disebabkan oleh faktor lain daripada semata-mata tekanan ekonomi. Dalam kaitan ini penting dibedakan antara tekanan ekonomi sebagai faktor pendorong dengan kebutuhan ekonomi sebagai faktor penarik. Apabila tidak ada tekanan ekonomi yang dirasakan, kebutuhan ekonomi sebagai gambaran dari situasi lokasi dan ekologi telah membuat orang untuk migrasi. tidak ada tekanan ekonomi yang dirasakan, kebutuhan ekonomi sebagai gambaran dari situasi lokasi dan ekologi telah membuat orang untuk migrasi. Hal ini, seperti Sabang selama masa pelabuhan bebas memainkan peranan yang aktif dalam membawa barang-barang untuk masuk, sehingga kebutuhan ekonomi yang ada pada prinsipnya merupakan faktor penarik.

Dari segi ini diharapkan bahwa tingkat migrasi yang tinggi, yang disebabkan oleh tekanan ekonomi akan berkurang apabila di daerah setempat semakin berkembang. Setidaknya dengan kemungkinan-kemungkinan ekonomi yang lebih baik di daerah tersebut, kecenderungan migrasi yang disebabkan oleh tekanan ekonomi dapat dikurangi, walaupun faktor-faktor penyebab lainnya tetap saja berperan.

Masalah seperti di atas sangat dirasakan oleh para migran di Sabang. Apabila ditinjau dari sudut edafik masing-masing daerah asal para migran tanahnya subur. Sesuai untuk tanaman padi dan kegiatan pertanian lainnya. Akan tetapi, tingkat pengembangan pertanian dalam pertanian tradisional secara optimal telah tercapai, yakni karena semua tanah yang ada telah dimanfaatkan untuk pertanian, situasi ekologi di daerah tersebut menjadi faktor pembatas untuk perkembangan selanjutnya. Jumlah penduduk yang terus berkembang, tahap keseimbangan mau tidak mau memberi makan jumlah penduduk yang bertambah banyak. Oleh karena itu, dalam hal seperti itu bermigrasi secara sukarela menjadi salah satu jalan keluarnya. Di tempat-tempat yang taraf keseimbangannya lebih parah, maka kemungkinannya akan lebih banyak orang yang bermigrasi. Hal seperti di atas, menurut Clifford Jansen bahwa perpindahan penduduk masyarakat ke tempat lain biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam bidang ekonomi di tempat asalnya (Jansen, 1979: 1).

Berbagai faktor lain, seperti politik atau kebijakan pemerintah dan teknologi sudah barang tentu harus dianggap konstan untuk tujuan argumentasi ini. Oleh karena itu, dengan perbaikan faktor politik dan teknologi, faktor lokasi dan edafik dapat berhenti menjadi faktor motivasi untuk bermigrasi.

### **3. Faktor sosial**

Bagi orang Minangkabau yang ada di Sabang, memang sudah lama melembaga dan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka untuk cenderung melakukan migrasi. Lain halnya dengan orang-orang, seperti Jawa walaupun ditemukan dimana-mana, migrasi di antara orang Jawa, Nias dan lainnya tidak berakar dalam sistem sosial mereka. Walaupun migrasi terjadi, tetapi bukanlah berupa lembaga yang secara kultural terpola. Migrasi orang Jawa dan Nias dan lainnya yang ada di Sabang, dahulunya adalah orang-orang yang diangkut sebagai kuli dan sebagai transmigrasi yang dibawa oleh Belanda dan Jepang di luar kemauan mereka sendiri.

Disamping itu , tekanan adat, adat terlalu sempit, menjadi penghambat, dan pertikaian dalam keluarga. Alasan kejiwaan, tidak merasa lega hidup di kampung, tertekan perasaan hidup di kampung, mencari kebebasan emosi, dipengaruhi orang lain, meniru orang lain, keinginan pergi dari kampung, mengadu untung, ingin bersaing, ingin melihat negeri orang lain, ingin hidup bertanggung jawab, kehidupan yang lebih baik di rantau, turut mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh seorang informan (Herman Siahaan, 35 tahun):

“Saya datang ke Sabang ini untuk melihat indahnya alam di sini, kemudian di sini ada kesempatan berusaha maka saya pun berusaha untuk mencari penghidupan”.

### **4. Faktor demografi**

Di suatu daerah, apabila penduduknya terlalu padat maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial, di antaranya masalah lapangan pekerjaan. Menyempitnya lapangan kerja karena persaingan mencari kerja

terlalu ketat akibat banyaknya jumlah penduduk, sehingga menjadi salah satu dorongan untuk melakukan migrasi ke tempat lain.

Akan tetapi, pertumbuhan penduduk menurut pengertian kerangka referensi konseptual Wertheim, karena pengertiannya selalu terkait kepada daya dukung ekonomi suatu masyarakat. Tekanan kependudukan yang tinggi belum tentu menyebabkan tingkat migrasi lebih tinggi, apabila di daerah tersebut tersedia sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian rakyat.

Evert S. Lee mengamati dari sudut pandang *push and pull factor* bahwa timbulnya migrasi sebagai akibat adanya faktor-faktor penarik positif dan faktor pendorong negatif, yang bersamaan terdapat di daerah asal dan di daerah lain (Lee, 1966: 47). Salah satu faktor penarik yang menyebabkan orang-orang pindah adalah banyaknya kesempatan kerja yang mereka peroleh di daerah tujuan. Di tempat yang baru itu dianggap memiliki prospek masa depan yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Pertimbangan lain, di tempat yang baru persaingan untuk memperoleh penghasilan tidak terlalu ketat seperti di daerah asalnya. Tidak ketatnya persaingan kerja karena di tempat yang baru populasi penduduknya masih rendah.

Menurut Milan J. Titus (1982:20-22), faktor pendorong munculnya migrasi cukup beragam, namun salah satu faktor utama yang mendorong mereka melakukan migrasi karena instabilitas ekosistem di tempat asalnya. Faktor ini berkaitan dengan pertanian dan faktor kondisi yang dimiliki oleh para migran di tempat asal. Titus beranggapan bahwa semakin kokohnya stabilitas ekosistem suatu masyarakat, semakin berkurang keinginan untuk pindah ke daerah lain. Sebaliknya, semakin goyah ekosistem suatu masyarakat, keinginan dan intensitas migrasi semakin besar. Dalam hal ini, bahwa ekosistem yang paling kokoh stabilitasnya adalah sistem sawah,

sedangkan yang paling goyah adalah ekosistem ladang dan tegalan. Berdasarkan konsep ini jelaslah bahwa yang menjadi penndorong orang bermigrasi salah satunya karena adanya instabilitas ekosistem di tempat asal.

### **C. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Pluralitas Masyarakat**

Pluralitas dan masyarakat majemuk merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku bangsa. Pluralitas terutama tampak dalam suatu masyarakat yang heterogen. Sikap pluralitas dalam kehidupan suatu masyarakat yang heterogen sudah pasti akan turut menentukan corak interaksi yang ada dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pada masyarakat Sabang, corak interaksi yang terjadi antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya maupun antarsuku bangsa terjalin dengan baik. Walaupun penduduk di Sabang terdiri atas berbagai suku bangsa yang berbeda namun mereka tidak pernah saling mendesak atau menaklukkan di antara suku bangsa yang ada. Hal ini menyebabkan tidak ada kelompok suku bangsa tertentu yang terdesak atau merasa didesak oleh suku bangsa yang lain.

Secara ideal pluralisme kebudayaan berarti penolakan kefanatikan, purbasangka, rasisme, dan penerimaan sikap menghargai kebudayaan tradisional orang lain (Haviland, 1988: 290). Bentuk pluralitas kebudayaan dapat dilihat di Kota Sabang dengan penduduknya bersifat heterogen dengan bermacam-macam kebudayaan dan bahasa serta memiliki tradisi kebudayaan dan nilai-nilai sendiri hidup secara berdampingan dengan suku bangsa lainnya. Hal ini terlihat pada suku bangsa Jawa, Minangkabau, Batak, dan lainnya sebagai penduduk pendatang yang mempunyai bahasa, kebudayaan dan makanannya sendiri, namun mereka dapat menghargai

kebudayaan penduduk asli setempat dan hidup bersama dalam satu masyarakat yang pluralis.

Kelompok-kelompok suku bangsa di Kota Sabang dapat hidup secara berdampingan dan damai tidak terlepas dari peran setiap anggota warga masyarakat dalam memupuk rasa kebersamaan dan mempunyai satu tujuan hidup yang damai sejahtera. Dalam mencapai kehidupan yang sejahtera serta rasa aman dan damai juga tidak terlepas dari sikap masyarakat asli setempat dalam hal menerima kedatangan para pendatang, baik untuk bermukim maupun yang tidak bermukim di Sabang. Kehadiran berbagai kelompok suku bangsa yang awalnya terjadi pada masa penjajahan membawa sikap tersendiri bagi penduduk asli seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan (Ramli, 64 tahun):

“Pada mulanya ketika orang luar datang ke Sabang, orang Aceh merasa cemas. Kecemasan ini disebabkan karena Pulau Sabang ini kecil namun didatangkan orang lain ke Sabang, sedangkan sawah dan ladang di Sabang tidak ada sehingga apa yang akan kita makan nantinya di sini. Itulah perasaan masyarakat Sabang saat itu”.

Kecemasan yang timbul pada masa itu disebabkan pula oleh kehadiran berbagai suku bangsa tersebut yang terdiri atas beribu-ribu orang yang berpengaruh pada soal pangan masyarakat. Sementara itu pemerintah Jepang mengatakan agar masyarakat jangan berpikir ke arah itu, tetapi berpikir agar Sekutu tidak masuk lagi ke Sabang.

Sejalan dengan perkembangan, sikap atau cara berpikir masyarakat dalam menerima kehadiran para pendatang dewasa ini sudah berpengalaman dan berpandangan luas. Mereka berprinsip apabila orang yang datang ke Sabang ini membawa satu rahmat kepada masyarakat Sabang, maka tidak ada masalah asalkan jangan membawa kemelaratan,

seperti melakukan suatu perbuatan yang melanggar susila atau syariat Islam di Aceh.

Apabila berbicara tentang pluralitas dalam masyarakat majemuk, maka tidak terlepas dari masalah etnosentrisme. Menurut Haviland (1988:292) etnosentrisme merupakan masalah besar yang melekat pada pluralitas kebudayaan, yaitu kepercayaan bahwa kebudayaan sendiri lebih baik daripada semua kebudayaan lain. Lebih lanjut Haviland mengatakan bahwa dalam bentuknya yang normal, etnosentrisme mengacu pada perasaan positif seseorang tentang kebudayaannya sendiri yang fungsi perasaan adalah memperkuat ego seseorang dan ikatan sosialnya kepada kelompoknya.

Pada masyarakat kota Sabang etnosentrisme tidak terjadi. Dalam kehidupan masyarakat setiap suku bangsa dan kebudayaannya tidak pernah berusaha menyebarkan kepercayaannya kepada kebudayaan lain. Setiap kelompok suku bangsa di samping mempunyai kebudayaan sendiri juga dapat menerima budaya lain serta dapat menghargai budaya masyarakat asli setempat sehingga kerukunan masyarakat tercapai. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat tidak menimbulkan masalah-masalah sosial seperti ketidaktenangan serta permusuhan. Setiap masyarakat berusaha bahwa melihat bahwa setiap orang yang satu terikat pada yang lain karena saling berhubungan.

#### **D. Interaksi Antarmasyarakat di Kota Sabang**

Masyarakat di Kota Sabang sangat heterogen, di samping penduduk asli yaitu masyarakat Aceh, terdapat pula penduduk pendatang yang sudah menetap yang bukan saja berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia yaitu Jawa, Padang, Batak serta suku bangsa lainnya, tetapi ada

juga penduduk keturunan Tionghoa. Masing-masing suku bangsa tersebut sudah barang tentu memiliki kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa karsa dan karya dari suku-suku bangsa tersebut. Selain itu, masing-masing suku bangsa ini juga mewujudkan sekian ciri-ciri yang biasanya merupakan ciri-ciri suatu bangsa, seperti kebudayaan sendiri, bahasa sendiri, identitas sendiri dan yang terpenting adalah perasaan solidaritas di antara warga anggota masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu, masyarakat ini memiliki pula aturan-aturan tertentu, nilai-nilai tertentu yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Suku bangsa merupakan golongan manusia/ golongan sosial dalam masyarakat. Untuk itu mereka saling berinteraksi satu sama lain dengan identitas yang masing-masing dimiliki golongan sosial tersebut. Sebab sebagai suatu tatanan budaya maka suku bangsa akan lebih mempunyai arti dalam hubungannya dengan suku bangsa lain. Oleh karena itu, interaksi pasti akan terjadi dalam kehidupan warga masyarakat sebagai makhluk sosial.

Kinball Young (Surjomihardjo, dkk, 1984) mengemukakan bahwa interaksi sosial adalah kunci kehidupan bersama, tanpa ada interaksi maka tidak mungkin ada kehidupan sosial dan kehidupan kelompok. Sementara itu, Soekanto (1990) mengemukakan bahwa bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial. Oleh sebab itu, interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Selanjutnya dijelaskan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan dan antara kelompok dengan kelompok manusia. Interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi syarat-syarat yaitu adanya kontak sosial serta adanya komunikasi antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok lain.

Kedatangan berbagai kelompok masyarakat ke Kota Sabang yang menyebabkan masyarakat di Sabang sangat heterogen pada awalnya dimulai pada masa kolonial Belanda. Pada masa ini didatangkan berbagai kelompok masyarakat, baik yang berasal dari Jawa maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia. Mereka bekerja sebagai buruh pada perusahaan Belanda yaitu Sabang Maskapai yang dikoordinir oleh pemerintah Belanda. Kelompok masyarakat ini didatangkan oleh Belanda sebab pada masa itu masyarakat di Sabang sangat sedikit. Selain faktor di atas, kedatangan berbagai kelompok masyarakat juga disebabkan karena tujuan untuk mencari suatu penghidupan seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan (Djafar, 69 tahun):

“Pada tahun 1905 orang tua saya datang dan menetap di Sabang pertama kali dengan tujuan mencari nafkah/ penghidupan. Pada masa itu ada perusahaan Sabang Maskapai dan orang tua saya bekerja di bagian dok sebagai penyelam. Pada masa itu penduduk sudah bercampur dimana ada yang berasal dari Jawa, Nias, Arab yang semuanya didatangkan oleh pemerintah Belanda. Bagi kelompok masyarakat tersebut tidak ada pemisahan tempat, mereka bertempat tinggal dalam satu wilayah yaitu kongsi yang dianggap sebagai asrama pelabuhan, kecuali orang Nias bertempat tinggal di tangsi Nias”.

Setelah kemerdekaan bertambah jumlah penduduk pendatang dimotivasi oleh dorongan karena lahan di daerah asal sudah mulai berkurang dan tidak subur lagi serta mata pencaharian yang terbatas, sementara itu mereka beranggapan bahwa Sabang lahan masih banyak. Selanjutnya kedatangan berbagai kelompok masyarakat terjadi pada masa era pelabuhan bebas (*freeport*) pada tahun 1973. Umumnya kedatangan mereka didorong oleh faktor ekonomi. Dalam era ini ditandai dengan peningkatan ekonomi yang sangat menguntungkan rakyat. Pengaruh

### *Bab III. Migrasi dan Pluralitas...*

ekonomi ini menyebabkan orang-orang berusaha mencari penghidupan di Sabang. Dalam perkembangan selanjutnya kedatangan berbagai kelompok masyarakat juga disebabkan oleh perkembangan Sabang sebagai daerah pariwisata yang menyebabkan kedatangan penduduk pendatang, baik yang menetap maupun musiman. Di samping hal-hal di atas, kedatangan orang-orang ke Sabang disebabkan pula karena pekerjaan sebagai pegawai yang menyebabkan mereka pindah ke daerah ini.

Kedatangan berbagai kelompok masyarakat di Sabang ini menyebabkan mereka hidup menyatu secara berdampingan dengan kelompok masyarakat lain. Untuk itu, setiap kelompok masyarakat ini harus mengadakan interaksi antara satu dengan yang lainnya untuk membentuk kerjasama yang didasari karena adanya persamaan kepentingan. Sebagai makhluk sosial sudah pasti mereka memiliki perasaan saling membutuhkan sehingga sebagai makhluk sosial mereka perlu mengadakan interaksi untuk mencapai suatu kehidupan yang damai sejahtera.

Agar terciptanya suatu kehidupan yang damai sejahtera tidak terlepas dari peran para anggota masyarakat dalam memupuk dan membina rasa kebersamaan di kalangan mereka. Walaupun memiliki latar belakang yang berbeda, baik budaya maupun agama, namun di antara mereka terjalin suatu hubungan yang baik dan mereka juga saling menghargai budaya setiap suku bangsa umumnya dan budaya penduduk asli khususnya. Hal ini tercermin dalam penjelasan salah seorang informan (Ramli, 64 tahun),

“Pendapat orang di Sabang ini maupun dimana-mana di setiap daerah sama saja. Negeri ini Indonesia punya, siapa saja yang Indonesia bisa datang dan tinggal di sini bersama penduduk asli Sabang. Akan tetapi, jangan lupa Sabang ini merupakan kampung

kami (orang Aceh). Indonesia negeri kita, namun Sabang adalah kampung kami. Oleh karena itu, siapa saja yang datang ke Sabang ini hormatilah kampung ini. Kepada para pendatang tidak ada masalah. Akan tetapi, kami tidak akan melepas kampung kami, kebudayaan dan cara kami berpikir tetap kami orang Aceh. Oleh karena itu, hormatilah cara kami orang Aceh. Itulah pendapat masyarakat di Sabang, ini kampung saya, negeri kita bersama, jadi budaya Aceh tetap dominan.”

Dengan kesadaran dan saling menghormat di antara warga masyarakat yang berbeda, baik suku bangsa, bahasa dan agama, namun masing-masing suku bangsa tersebut tidak menonjolkan daerah asalnya dan mereka saling mendukung sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak pernah terjadi bentrokan dan kehidupan bermasyarakat dapat tercipta secara damai.

## **1. Penduduk Asli dengan Pendatang**

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penduduk Kota Sabang sangat heterogen atau disebut masyarakat majemuk (*plural society*). Mayoritas penduduk berasal dari Aceh sebagai penduduk asli dan lainnya berasal dari Jawa, Padang, Batak serta suku bangsa lainnya sebagai penduduk pendatang. Kedatangan berbagai kelompok suku bangsa ini di kota Sabang diperhadapkan dengan kelompok suku bangsa Aceh sebagai penduduk asli sudah barang tentu terjadinya jalinan hubungan atau interaksi di antara mereka.

Suatu interaksi sangat rapat hubungannya dengan struktur sosial masyarakat itu sendiri. Bila struktur sosial masyarakat itu telah mantap maka interaksi antara anggota masyarakatnya akan membentuk suatu kehidupan yang harmonis. Di Kota Sabang yang penduduknya terdiri atas berbagai suku bangsa baik sebagai penduduk asli dengan pendatang di

Sabang sangat harmonis. Walaupun mereka mempunyai perbedaan dalam adat istiadat, tetapi kemudian mereka dapat menerima suatu kebersamaan untuk meningkatkan taraf hidup. Misalnya, setiap ada kegiatan sosial di Sabang mereka bekerja secara bersama-sama. Dalam kehidupan masyarakat, mereka sudah menyatu sehingga tidak ada perbedaan seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan (Djafar, 74 tahun):

“Kita ini orang Indonesia tidak ada lagi menyebut kamu orang Jawa, orang Aceh, tetapi orang Indonesia”.

Terjadinya interaksi yang baik di antara anggota masyarakat dengan yang lain menyebabkan sikap-sikap saling tertutup dan berprasangka yang merupakan ketegangan dalam masyarakat dapat dihindarkan. Interaksi yang terjadi antara penduduk pendatang diperhadapkan dengan penduduk asli tentunya ada faktor-faktor tertentu yang dapat menjalin interaksi antara mereka berupa kegiatan mata pencaharian, organisasi sosial di lingkungan tempat tinggal, perkawinan, keagamaan dan bahasa.

Dalam aspek mata pencaharian hidup yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan seorang diri tanpa mempunyai jaringan hubungan dengan orang lain dan tidak terbatas di lingkungan tempat tinggalnya. Pada masa kolonial Belanda terlihat bahwa berbagai kelompok suku bangsa di Sabang, mata pencahariannya adalah sebagai buruh pada perusahaan maskapai Belanda. Interaksi terjadi karena mereka sama-sama sebagai buruh, mereka merasa senasib dan sepenanggungan. Apalagi pada masa ini kelompok-kelompok suku bangsa sudah bercampur atau tidak ada pemisahan tempat untuk bermukim. Tempat bermukim dalam satu wilayah ini menyebabkan terjadinya interaksi dan dijadikan sebagai sarana komunikasi antarsuku bangsa tersebut. Dengan sarana tersebut mereka dapat saling berinteraksi

dan bantu membantu bila menghadapi kesulitan-kesulitan. Walaupun mereka mempunyai perbedaan dalam adat istiadat, mereka kemudian dapat menerima suatu kebersamaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini semua terwujud karena sifat yang ada di dalam diri setiap manusia bahwa mereka mempunyai kecenderungan untuk hidup bermasyarakat dan berkelompok secara aman dan damai serta ingin mencapai kebahagiaan. Selain itu, dalam aspek mata pencaharian hidup sekarang ini terlihat bahwa berbagai kelompok suku di Sabang mata pencahariannya adalah sebagai pegawai negeri, pedagang dan sebagainya. Interaksi terjadi karena sebagai sesama pekerja dan juga disebabkan adanya saling mengisi dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Dalam kegiatan organisasi sosial di Sabang terlihat adanya kerjasama anggota masyarakat dalam berbagai aspek seperti arisan, PKK, karang taruna yang melibatkan setiap anggota masyarakat. Kegiatan pemuda pada umumnya lebih diarahkan pada kegiatan pramuka. Di lain pihak, kegiatan olahraga juga mempunyai peranan dalam membina hubungan di antara masyarakat seperti kegiatan bola voli, sepakbola dan sebagainya. Dalam kegiatan organisasi tersebut berbagai macam kelompok masyarakat berkumpul sehingga dapat tercipta suatu jalinan hubungan yang baik antarwarga masyarakat.

Selanjutnya, interaksi yang diakibatkan oleh perkawinan adalah terjadinya perkawinan campuran antarsuku bangsa (amalgamasi). Hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan ideal dan pembatasan jodoh dalam masyarakat tidak lagi dapat dilakukan sepenuhnya, karena masyarakat di Sabang merupakan campuran dari berbagai suku bangsa. Dengan kemajemukan masyarakat seperti itu, perkawinan campuran sudah banyak terjadi. Pada prinsipnya walaupun mereka dari suku bangsa yang berbeda, melalui perkawinan mereka juga dapat menjalin hubungan dan hidup bersama dalam satu rumah tangga.

Pelaksanaan perkawinan campuran di Kota Sabang dapat dibedakan atas perkawinan antarsuku dan perkawinan sesama suku. Perkawinan yang umum terjadi adalah perkawinan antarsuku. Perkawinan antarsuku yang sering terjadi di Sabang ini, misalnya antara orang Aceh dengan Jawa, orang Aceh dengan Minangkabau, orang Jawa dengan Minangkabau, dan sebagainya. Perkawinan campuran ini terjadi secara timbal balik, seperti perkawinan antara laki-laki Aceh dengan perempuan Jawa ataupun sebaliknya. Perkawinan campuran seperti ini tidak selamanya mengorbankan semua adat yang bersangkutan, adakalanya perkawinan dilangsungkan dengan menggabungkan adat keduanya. Namun, umumnya sebelum dilangsungkannya perkawinan diadakan dahulu permufakatan antarkedua keluarga yang bersangkutan. Permufakatan dilaksanakan secara damai, namun kebanyakan diambil secara adat Aceh. Ini disebabkan karena adat atau kebudayaan yang lebih dominan di Sabang adalah budaya Aceh. Walaupun kelompok-kelompok suku bangsa yang terdapat di Sabang, misalnya suku bangsa Minangkabau melakukan adat istiadatnya, namun terbaaur juga dengan adat Aceh. Akan tetapi, ada juga diselipkan adat Padang tetapi sudah dikombinasikan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang informan (Ramli, 64 tahun):

“sewaktu saya menikahkan anak saya dengan orang Jawa, pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dominan secara adat Aceh, namun ada juga memakai adat Jawa yaitu pelaksanaan upacara mandi dengan menggunakan adat Jawa. Jadi pelaksanaan perkawinan dilakukan secara berbaaur.”

Percampuran budaya yang terjadi menyebabkan dalam pelaksanaan upacara perkawinan tidak ada yang asli, semuanya berbaaur sehingga dalam upacara perkawinan diadakan *peusijuek* secara adat Aceh dan juga diadakan *gagar mayang* secara adat Jawa. Perkawinan campuran yang terjadi seperti ini tidak ada masalah lagi bagi setiap kelompok masyarakat.

Pada dasarnya setiap masyarakat berprinsip kalau sudah saling kenal maka sudah merupakan kodrat Tuhan. Hal-hal di atas menyebabkan sukuisme kelompok, suku bangsa tersebut menghilang, sehingga menjadikan kehidupan masyarakat di Kota Sabang itu aman dan tentram. Antara satu suku dengan suku lain tidak pernah ada bentrokan karena bersatu seperti lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut (Ramli, 64 tahun):

“Masyarakat di Kota Sabang sudah bersatu dan tidak ada bentrokan, anak-anak kawin dengan suku Jawa, Batak, dan sebagainya. Jadi misalnya apabila orang Aceh marah dengan orang Batak sedangkan menantunya orang Batak bagaimana pula ia bisa marah. Dengan demikian tidak ada lagi berbicara masalah beda suku di Sabang ini”.

Hal di atas juga dipertegas oleh informan (Poniman, 65 tahun):

“antar suku tidak pernah ada bentrokan. Saya orang Jawa, anak saya kawin dengan orang Aceh, Padang, tidak ada masalah. Jadi kami sudah benar-benar satu bangsa satu bahasa di Sabang ini”.

Bentuk perkawinan yang lain adalah perkawinan secara satu suku. Perkawinan semacam ini secara adat tidak masalah karena tidak ada perbedaan adat. Apabila terjadi perkawinan antara orang Aceh dengan orang Aceh, pelaksanaan perkawinan sepenuhnya secara adat Aceh. Namun, apabila perkawinan sesama suku di luar Aceh, umumnya pelaksanaan perkawinan dilakukan secara berbaur yaitu di samping memakai adat suku yang bersangkutan juga memakai adat Aceh. Bentuk-bentuk perkawinan di atas umumnya adalah perkawinan yang satu agama, sedangkan perkawinan antaragama jarang terjadi.

Dari aspek keagamaan, interaksi terjalin dengan baik walaupun antara kelompok-kelompok suku bangsa berbeda agama, ada yang

beragama Kristen, Katolik, Budha dan mayoritas Islam, namun hal ini bukan merupakan penghalang bagi mereka dalam berinteraksi. Kehidupan keagamaan di Kota Sabang telah terbina, mereka menjalankan agamanya masing-masing tanpa mencampuri agama lain. Keadaan serta toleransi agama antarpenganut agama dapat dikatakan memadai, hal ini karena penduduk Sabang lebih heterogen, baik dilihat dari suku bangsa maupun agamanya. Antar pemeluk agama sama-sama saling menjaga, menghargai dan menjalin hubungan dengan baik. Antarpemeluk agama juga tidak pernah mengganggu aktivitas dari masing-masing agama, baik yang menyangkut ibadah maupun yang bukan kegiatan ibadah.

Begitu pula dilihat dari aspek bahasa, bahasa di dalam kehidupan masyarakat mempunyai fungsi utama sebagai alat interaksi sosial. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan budaya manusia, karena antara bahasa dan budaya ada semacam hubungan timbal balik. Bahasa merupakan salah satu hasil budaya manusia sedangkan budaya manusia banyak yang dipengaruhi oleh bahasa. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Oleh karena bahasa merupakan alat penting untuk komunikasi dalam suatu kehidupan masyarakat, pemeliharaan, penyebaran serta peningkatan aspek dan nilai hakiki dari budaya bangsa, oleh karena itu bahasa sering disebutkan sebagai unsur dominan dari kebudayaan.

Setiap individu sejak lahir berada dalam kelompok dimana ia hidup, dibesarkan dan berkembang. Setelah seseorang dewasa melalui pergaulan, seringkali berada di luar kelompoknya sendiri dan lingkungan akan banyak mempengaruhinya. Kelompok selain mempunyai bentuk 7 ciri, identitas tersendiri, juga mempunyai bahasa “asuhan kelompok”. Apabila seseorang hidup dan berada dalam kelompok bahasa yang dipergunakan dan berkembang adalah bahasa dari kelompoknya. Keberadaannya di luar kelompok misalnya disebabkan keperluan pendidikan atau pekerjaan,

mengharuskan individu tersebut mempelajari, mengetahui dan kemudian mempergunakan bahasa di luar kelompok bahasa “awalnya” (T.A. Ridwan, 1989: 152).

Pola komunikasi antarsuku pada masyarakat Kota Sabang adalah menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi adakalanya sewaktu mereka berkomunikasi dengan sesama sukunya mereka menggunakan bahasa awalnya atau bahasa daerahnya sendiri. Namun, tidak semua suku melakukannya, ada juga antarsesama suku mereka dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa Indonesia. Seorang informan (Poniman, 65 tahun) mengatakan:

“Budaya kesukuan pada tingkat anak sudah mulai luntur, bahkan bahasa ibu antara bisa dan tidak bisa. Seperti saya mengerti bahasa Jawa, tapi tidak lancar, sehingga lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja”.

Seorang informan lainnya (Katimin, 74 tahun) juga menjelaskan:

“bahwa tidak ada diajarkan budaya kelompoknya ataupun budaya di luar kelompoknya. Namun, mereka dengan sendirinya mengetahui bahwa budaya itu ada. Misalnya apabila ada yang berbicara menggunakan bahasa awal ataupun bahasa di luar kelompoknya, maka mereka mengerti akan tetapi jika sudah berkumpul dan berbaur tetap menggunakan bahasa Indonesia”.

Dari paparan di atas, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang lazim dipergunakan oleh anggota masyarakat dalam berinteraksi. Penggunaan bahasa daerah hanya dipergunakan dalam berinteraksi dengan sesamanya. Walaupun demikian, umumnya mereka masih mengerti bahasa daerahnya, hanya saja dalam pengucapannya sudah tidak begitu lancar.

## **2. Antarpenduduk pendatang**

Setiap warga masyarakat yang hidup bersama dalam suatu wilayah sudah pasti akan menjalin suatu hubungan disebabkan setiap individu manusia mempunyai ketergantungan serta saling membutuhkan antara individu yang satu kepada individu lainnya.

Masyarakat di Kota Sabang selain terdiri atas penduduk asli terdapat pula penduduk pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti suku bangsa Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Interaksi yang terjalin di antara mereka berjalan dengan baik sebagaimana halnya interaksi yang terjadi di antara penduduk asli dengan pendatang. Interaksi yang terjadi antarpenduduk pendatang dapat mencakup tentang penggunaan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, sistem perkawinan dan sebagainya.

Pada prinsipnya antar penduduk pendatang dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan pola komunikasi yang mutlak digunakan antarpenduduk pendatang di Kota Sabang dalam berinteraksi.

Walaupun penduduk di Kota Sabang sudah ada yang menyebut dirinya orang Sabang, karena lahir dan dibesarkan di tempat tersebut bahkan banyak di antara mereka yang tidak dapat menggunakan bahasa daerah asalnya, akan tetapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari terdapat beberapa tradisi yang berasal dari daerahnya masih dilakukan, namun tidak sepenuhnya, seperti dalam sistem perkawinan. Hal-hal yang berhubungan dengan upacara perkawinan, misalnya sebagian ada yang masih berakar dari budaya asal mereka, tentu saja dengan berbagai penyesuaian dengan tradisi masyarakat tempat mereka tinggal. Selain itu, perkawinan ideal dan pembatasan jodoh dalam masyarakat tidak lagi dapat dilakukan sepenuhnya, karena merupakan campuran dari berbagai suku bangsa.

Dengan kemajemukan masyarakat seperti ini perkawinan campuran sudah banyak terjadi antarpenduduk pendatang. Dalam pelaksanaan perkawinan antarpenduduk pendatang, misalnya perkawinan yang terjadi antara suku Jawa dan Padang, maka dalam pelaksanaan upacara perkawinan menggunakan sebagian adat Jawa dan sebagian adat Minangkabau. Semua ini tergantung dari permufakatan keluarga yang bersangkutan. Namun, kebanyakan antarpenduduk pendatang juga menggunakan adat Aceh disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

## **BAB 4. PENUTUP**

Salah satu daerah di wilayah Provinsi Aceh yang mempunyai tingkat pluralisme yang tinggi adalah Kota Sabang. Di Kota ini hidup bermacam-macam suku bangsa, baik yang berasal dari wilayah Provinsi Aceh, seperti Aceh, Aneuk Jamee, Gayo dan sebagainya maupun suku bangsa yang berasal dari luar Provinsi ini, seperti etnis Tionghoa ataupun suku bangsa Jawa. Mereka hidup dengan aman dan damai. Ada rasa toleransi dan tenggang rasa yang cukup tinggi di antara mereka. Apabila mereka ditanya darimana mereka berasal, maka seringkali kita dengar mereka menjawabnya dengan orang Sabang. Mereka tidak menyebut dari daerah asal mula mereka berada.

Kondisi pluralisme yang demikian terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang. Pada awalnya, Kota Sabang ini memang dihuni oleh penduduk asli yang ada di kawasan Provinsi Aceh. Sejak Belanda masuk ke daerah ini dan menetapkan Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas telah merubah wajah kota ini pada masa itu. Karena daerah ini memerlukan tenaga kerja untuk membuka dan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kondisi Sabang sebagai daerah pelabuhan bebas, Belanda mendatangkan banyak tenaga kerja yang berasal dari luar Sabang. Banyak di antara mereka yang didatangkan ke daerah ini membawa keluarganya. Kaum laki-laki bekerja di pelabuhan, sedangkan kaum perempuan ada yang bekerja di ladang. Pada awalnya, penduduk asli ada yang merasa tidak berkenan karena wilayah Sabang tidak begitu luas. Namun, setelah beberapa waktu berjalan, perasaan itu mulai hilang dengan sendirinya. Kaum pendatang ini diterima dengan baik. Selain karena faktor politik/kebijakan pemerintah Belanda, terbentuknya masyarakat yang pluralisme di Kota Sabang adalah karena faktor ekonomi, sosial dan demografi. Hal ini

tampak pada perkembangan selanjutnya di Kota Sabang, yang pada saat menyandang predikat pelabuhan bebas, banyak masyarakat yang datang ke kota ini untuk melakukan transaksi ekonomi. Alasan ekonomi mulai tampak berkurang ketika predikat Sabang sebagai pelabuhan bebas dicabut oleh pemerintah.

Pluralisme yang terbentuk di Kota Sabang telah menyebabkan budaya-budaya masing-masing suku bangsa yang ada di daerah ini telah menyatu (berakulturasi). Mereka tidak lagi fanatik memegang budaya asal mereka. Hal ini membawa akibat lebih lanjut kepada interaksi yang harmonis di antara warga masyarakat. Mereka telah memaklumi apabila melihat budaya “asing” yang berada di luar lingkungan mereka. Terbentuknya sikap ini berasal dari percampuran budaya melalui perkawinan yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun di antara anggota masyarakat Sabang.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bale, Djenen

1995 *Studi Pertumbuhan dan Pemudaran Kota Pelabuhan*. Jakarta: Depdikbud.

D.G.E. Hall,

1988 *Sejarah Asia Tenggara*, terjemahan: I.P. Soewarsha (Eds): I.P. Soewarsha dari M. Habib Mostoppo. Surabaya: Usaha Nasional.

BPDPBPBS-FE Unsyiah

1967 *Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang*. Banda Aceh: BPDPBPBS-FE Unsyiah

Emilyus E. Ismail,

1988 “Pedagang Cina dan Kegiatan Jenjek di Pelabuhan Bebas Sabang” dalam Dorajatun Kuntjorojakti, *Perdagangan, Pengusaha Cina, Perilaku Pasar*. Jakarta: Pustaka Grafika Kita.

Everetts, Lee

1984 *Suatu Teori Migrasi*. Yogyakarta: PPK UGM

Jansen, C

1970 *Reading in the Sociology of Migration*, Oxford, Pergamon Press

J. Jongejans

1939 *Land en Volk Van Atjeh Vroeger en Nu*. Barn: Hollandia  
Drukkerij

J. Langhout,

1923 *Vijftig Jaren Ecocomische Staatkunde In Atjeh*, Den Haag:  
W.P. Van Stockum dan Zoon.

J. Kreemer,

1923 *Atjeh (Algemeen Samenvattend Overzicht van Land Vok van  
Atjeh en Onderhoorigheden), Tweede Deel*. Leiden: Boehandelen  
Drukkerij Voorheen E.J. Brill.

John Langhout,

1924 *The Economic Conquest of Acheen by The Dutch*. The  
Hague: W.P. Van Stockum & So Ltd.

J.W. De Vos,

1935 *Algemeene Memorie Betreffende de Onder Afdeeling  
Sabang, Afdeeling Groot Atjeh, Gouv Atjeh en Onderhoorigheden 30  
Desember 1935*.

Geetz, C

1981 *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Jakarta: YIIS-  
UI.

Haviland, William A,

1988 *Antropologi Edisi Ke Empat Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Karim, M. Rusli, (ed)

*Seluk Beluk Perubahan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.

Labre, B

1984 *Kehidupan Sosial Ekonomi Jenjek di Sabang*. Banda Aceh: PPISB Unsyiah.

M.G. De Boer,

1924 *Zeehaven en Kolenstation Sabang 1899-1924, Gedenkschrift op 1 Januari 1924*. Amsterdam: L. Van Leer & Co.

Mahmud, Samsudin dkk,

1968 *Pelabuhan Bebas Sabang 1967*. Banda Aceh: LPES-BPKP4BS

Mia Koning – Van der Veen,

1990 *Dromen Over Sabang*

Milone, PD

1964 *Contemporary Migration in Indonesia*. Asian Survey 4(8): 1000-1012

Naim, Mochtar

1984 *Merantau: Pola Migrasi Suku Minang*. Yogyakarta: Gama Press.

Pardoko

1987 *Mobilitas Migrasi dan Urbanisasi*. Bandung: Angkasa.

Pelly, Usman, dkk.

1989 *Interaksi Antarsuku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Depdikbud.

Piekar, A.J.

1998 *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi

Rusli, Said

1995 *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES.

Royce Annya Peterseon

1982 *Ethnic Identity: Strategies of Diversity*. Bloomington: Indiana University Press

Ridwan, T.A.,

1989 *Integrasi: Sekadar Tinjauan Kebahasaan di Sumut dalam interaksi Antar Suku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Depdikbud

Soekanto, Soejono

1985 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

Soemardjan, Selo dan Soelaiman Soemardi

1974 *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI

Sufi, Rusdi

1996 *Proklamasi Kemerdekaan RI di Aceh*. BKSNT Banda Aceh.

Surjoniharjo, Aburrachman, dkk,

1984 *Masalah Kehidupan Beragama dan Integrasi Nasional*. Lembaga Research Kebudayaan Nasional. Jakarta: LIPI

Tan, Mely G

1970 *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta Djembatan.

Walad, Yusuf, dkk

1974 *Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas*. Banda Aceh: LPES-FE Unsyiah.

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ramli Haji  
Umur : 64 Tahun  
Alamat : Jl. O. Surapati  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SR (Volksschool)  
Pekerjaan : Pensiunan ABRI
  
2. Nama : Djakfar bin Muhammad Tayeb  
Umur : 69 Tahun  
Alamat : Jl. R. Suprpto  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SD Gouvrmnt Lague School  
SMP (partikuler) kelas 2  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pengadilan Negeri Sabang

3. Nama : Poniman Sareh  
Umur : 65 Tahun  
Alamat : Jl. R. Suprpto  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SRE (Sekolah Rendah Eropah). SD, SMA YMIK,  
D1 Sejarah  
Pekerjaan : Sekretariat Negara
4. Nama : Katimin  
Umur : 74 Tahun  
Alamat : Pantai Kasih, Kota Atas Sabang  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : Sovolgschool  
Pekerjaan : -

ISBN 978-602-9457-61-2

SABANG

5000 TONS - 5000



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH**  
(Wilayah Kerja Provinsi Aceh - Sumut)

Jln. TWK. Hasyim Banta Muda No. 17, Kp. Mulia, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh - 23123.

☎ 0651-23226 | 📠 0651-23226 | ✉ [bpnbaceh@kemdikbud.go.id](mailto:bpnbaceh@kemdikbud.go.id)

🌐 <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaseh/>

Perpustakaan  
Jenderal